PENGARUH PAJAK HIBURAN DAN PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015-2017

SKRIPSI

Oleh :

ELVARINA RIZAL
NIM : G71215031

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	: Elvana Rizal
NIM	: G71215031
Fakultas/Prodi	: Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ilmu Ekonomi
Judul Skripsi	: Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli daerah kota Surabaya Tahun 2015-2017

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 April 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
2F01CAFF669944458
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Elvana Rizal
NIM. G71215031

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Elvarina Rizal, NIM : G71215031 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 April 2019

Pembimbing

Nurlailah SE,MM

NIP. 196205222000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Elvarina Rizal, NIM G71215031 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin tanggal 29 April 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Ekonomi.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Nurlailah SE, MM
NIP. 196205222000032001

Penguji II

Lilik Rahmawati, MEI
NIP. 198106062009012008

Penguji III

Dr. Fatmah, ST, MM
NIP. 197507032007012020

Penguji IV

Abdul Hakim, MEI
NIP. 197008042005011003

Surabaya, 29 April 2019
Mengesahkan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H.Ali.Ali Arifin, MM
NIP. 196212141993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Elvarina Rifal
NIM : 671215031
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ilmu Ekonomi
E-mail address : elvarinar@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 - 2017

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Juni 2019

Penulis

(Elvarina . R.)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen penting dalam suatu daerah khususnya kota Surabaya yang juga menjadi Ibukota provinsi Jawa Timur. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan-pembiayaan daerah yang dilakukan akan diambil dari dana PAD tersebut. sebagai Ibukota tentunya banyak keperluan dan kepentingan ekonomi yang harus dilakukan kota Surabaya. Salah satu komponen pembentuk PAD berasal dari pajak yang juga merupakan penopang pembiayaan terbesar negara. Pajak yang cukup berkontribusi di Surabaya yakni pajak hiburan dan pajak reklame. Kedua pajak tersebut dapat menjadi sumber pembiayaan bagi keperluan masyarakat daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh pajak hiburan dan pajak reklame serta bagaimana kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah kota Surabaya pada tahun 2015-2017. Metode yang digunakan yaitu penelitian secara kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam analisis ini merupakan data sekunder yang diambil secara langsung dari Badan Keuangan dan Pajak Daerah kota Surabaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara variabel pajak hiburan dan pajak reklame memiliki pengaruh yang prosentasenya sangat kecil dari total keseluruhan pendapatan asli daerah Surabaya. Sedangkan, kontributor tertinggi dari pajak daerah Surabaya yakni dari sektor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Perbandingan atas perolehan BPHTB dengan pajak hiburan dan pajak reklame ini memiliki selisih yang sangat jauh.

Pemerintah daerah diharapkan untuk mampu memaksimalkan pajak hiburan dan reklame dengan mengembangkan berbagai tempat hiburan di Surabaya yang berpotensi menghasilkan pajak dan memperbaiki regulasi pengenaan pajk reklame. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat mengatasi problem yang menjadi penyebab kecilnya kontribusi pajak reklame dan pajak hiburan di Kota Surabaya tahun 2015-2017.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Hiburan, Pajak Reklame

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR TABEL ix
BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan penelitian 12
D. Manfaat Hasil Penelitian 12
BAB II : KAJIAN PUSTAKA 14
A. Landasan Teori 14
B. Penelitian Terdahulu 30
C. Kerangka Konseptual 38
BAB III : METODE PENELITIAN 39
A. Jenis Penelitian 39
B. Waktu dan Tempat Penelitian 40
C. Populasi dan Sampel Penelitian 40
D. Definisi Operasional 41
E. Data dan Sumber Data 42
F. Teknik Pengumpulan Data 42
G. Teknik Analisis Data 43
BAB IV : HASIL PENELITIAN 46
A. Deskripsi Umum Objek Penelitian 46
B. Analisis Data 54
BAB V : PEMBAHASAN 73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap PAD Kota Surabaya 73
B. Pengaruh Pajak Reklame Terhadap PAD Kota Surabaya 75
BAB VI : PENUTUP 79
A. Kesimpulan 79
B. Saran 79
DAFTAR PUSTAKA 82
LAMPIRAN 85
BIODATA 99

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

2.1 Perbedaan Pajak dan Retribusi.....19
2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....36
4.1 Data PAD kota Surabaya Tahun 2015-2017.....57
4.2 Pajak Hiburan Kota Surabaya Tahun 2015-2017.....59
4.3 Pajak Reklame Kota Surabaya Tahun 2015-2017..... 61
4.4 Tabel Perolehan Pajak daerah 2015-2017.....63

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

2.1 Kerangka Konseptual..... 38
4.1 Grafik Perolehan PAD, Pajak Hiburan, Pajak Reklame 2015-2017.....54
4.2 Grafik Perolehan Pajak Daerah 2015-2017.....59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua pendapatan yang diperoleh suatu daerah yang berasal dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang diambil berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku[1]. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari beberapa, seperti pajak, retribusi dan pendaptan daerah lainnya yang sah. Kretivitas dan inisiatif suatu daerah dalam memaksimalkan sumber keuangan akan sangat bergantung pada kebijakan dan aturan yang diambil oleh pemerintah.[2] Pendapatan Asli Daerah ini digunakan oleh tiap-tiap daerah untuk membiayai daerahnya sendiri agar tidak selalu ketergantungan terhadap pemerintahan pusat seperti bergantung kepada subsidi yang diberikan pemerintah pusat.

[1] Ahmad Yani, "Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia"(Jakarta: PT Raja Grafindo persada. 2002) Hlm. 51

[2] Abdullah dan Halim. 2003. "Pengaruh Pajak Daerah dan PAD terhadap Belanja Daerah di Indonesia".Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol 7, No. 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fungsi Utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah untuk memuaskan dan memenuhi segala kepentingan umum yang berkaitan dengan masyarakat luas.[3] Fungsi ini dicapai melalui program-program pemerintahan daerah yang modalnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa masalah yang teratasi dengan adanya PAD antara lain pengangguran, inflasi, kemunduran ekonomi, dll. Misalnya saja untuk mengatasi pengangguran, maka pemerintah perlu membuat dan menjalankan program yang dapat mengurangi jumlah pengangguran di daerah seperti kota Surabaya. Contohnya dengan membuat program pembinaan keterampilan untuk masyarakat sehingga mereka dapat memiliki skill yang bisa diimplementasikan untuk bekerja. Program tersebut tentunya membutuhkan dana untuk dijalankan, maka dana yang digunakan diambil dari dana PAD kota Surabaya. Jika pengangguran berkurang, maka pendapatan per kapita masyarakat Surabaya akan meningkat sehingga tingkat kemiskinan menurun dan keadaan ekonomi pun akan stabil.

Kota Surabaya merupakan kota pahlawan yang memiliki karakteristik khas yakni dibidang kuliner dan banyaknya pusat perbelanjaan serta gedung-gedung tinggi yang dibangun disana. Berkedudukan sebagai Ibu kota Jawa Timur, maka kota ini menjadi salah satu kota di Indonesia yang padat dan memiliki beragam aktifitas ekonomi. Menjadi salah satu kota besar di Jawa Timur, maka tidak heran jika di kota

[3]Ahmad Yani Op. cit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pahlawan ini banyak didirikan mall dan pusat perbelanjaan modern. Selain untuk berbelanja, masyarakat setempat memanfaatkan keberadaan mall-mall tersebut sebagai sarana hiburan untuk merefleksikan diri dari berbagai rutinitas dan kepadatan yang ada di kota Surabaya. Bahkan pengunjung yang datang kesana bukan hanya berasal dari warga asal kota tersebut saja, seringkali masyarakat dari luar datang jauh-jauh untuk mengunjungi beragam pusat perbelanjaan tersebut untuk menikmati waktu senggang bersama keluarga atau teman dekat. Hal tersebut tentunya akan mengakibatkan beragam transaksi, yang nantinya akan berdampak pada jumlah pemasukan daerah yang didapatkan oleh kota Surabaya, sehingga mempengaruhi perekonomian daerah tersebut.

Perekonomian suatu daerah juga banyak bergantung banyak dari adanya pemasukan pajak. Oleh karena itu, pajak dapat dikatakan menjadi salah satu instrumen penting bagi suatu daerah. Tidak terkecuali kota Surabaya, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa kota ini memiliki karakteristik khas di bidang kuliner dan banyaknya pusat perbelanjaan. Keberadaan tempat-tempat tersebut akan berdampak pada penetapan pajak yang harus dibayarkan ke pemerintahan kota Surabaya. Pendapatan Asli Daerah berasal dari pendapatan pajak, retribusi, dan pendapatan daerah lainnya yang sahh, maka jumlah PAD yang dihasilkan suatu daerah akan dipengaruhi oleh pendapatan dari pajak yang didapatkan oleh wilayah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan sangat strategis dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah serta untuk dipergunakan bagi keperluan daerah sehingga mencapai kemakmuran rakyat.[4] Pajak berkedudukan sebagai sumber penerimaan negara yang sangat penitng bagi pelaksanaan pembangunan nasional dan penyelenggaraan Pemerintah.[5]

Pajak ini akan dikelola oleh Badan Keuangan dan Pengelolaan Pajak Kota Surabaya. Mengapa pajak disebut sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, karena hasil pembayaran pajak akan digunakan untuk berbagai pembiayaan daerah seperti pembiayaan infrastruktur dan kebutuhan daerah yang lain. Pajak merupakan pendapatan negara yang penting bagi negara. Bahkan, 70% pemasukan negara diambil dari pendapatan pajak.[6] Bagaimana tidak, pajak telah banyak berkontribusi dan berperan penting dari mulai belanja pegawai sampai pada proyek pembangunan besar. Maka, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara.

Untuk itu, perlu kita sadari bahwa pajak merupakan hal paling penting bagi suatu negara. Kita sebagai warga negara yang baik tentu wajib untuk mentaati aturan negara dan membayar pajak dengan rutin. Hasil dari pajak tersebut juga akan dapat dirasakan manfaatnya oleh kita

[4]Theresia Woro Damayanti dan Supramono, "Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan"(Yogyakarta: Andi. 2005) Hlm 2
[5]Waluyo, "Perpajakan Indonesia Edisi 10 "(Jakarta: Salemba Empat, 2011) hal.225
[6]Muhammad Bayu Tjahyono, "Reformasi Pajak Rakyat Dapat Apa", (www.pajak.go.id), Pada 2 September 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri. Karena pembiayaan dari pajak yang nantinya akan digunakan untuk infrastruktur dan fasilitas negara diperuntukkan untuk masyarakat sendiri.

Pajak daerah sendiri berasal dari berbagai sumber. Undang-undang telah menyebutkan dan menjelaskan secara detail terkait pengenaan pajak daerah ini. Jenis pajak daerah yang diatur dalam peraturan daerah yakni; pajak restoran, pajak reklame, pajak air tanah, pajak hotel, pajak parkir, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak sarang burung walet.[7] Banyaknya pusat perbelanjaan di Surabaya yang juga menjadi sarana hiburan bagi masyarakat sekitar akan berkontribusi dalam pengenaan pajak hiburan.

Pajak hiburan adalah pajak atas segala penyelenggaraan hiburan yang ada di daerah terkait. Hiburan merupakan semua jenis pertunjukan, permainan, tontonan, atau segala aktifitas keramaian yang dinikmati dan dipungut biaya atas pelaksanaanya.[8] Pajak hiburan meliputi: tontonan film; pameran; kontes kecantikan, binaraga dan sebagainya; pagelaran musik, tari dan/atau busana; diskotik, klab malam atau sejenisnya; sirkus, akrobat, atau sulap; permainan bilyard dan golf serta bowling; pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan; refleksi spa/mandi uap, puat kebugaran, panti pijat; pertandingan olahraga. Semua kegitan hiburan yang dikenakan biaya dan termasuk dalam objek diatas maka akan masuk dalam

[7]Mardiasmo,"Perpajakan Edisi Terbaru Tahun 2016"(Yogyakarta:CV Andi Offset. 2016) Hlm 15
[8]Diaz Priantara, "Perpajakan Indonesia Edisi 2"(Jakarta: Mitra Wacana Media: 2012) Hlm 558

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pungutan pajak hiburan. Pengenaan pajak hiburan tersebut diatas juga berbeda-beda tiap jenisnya. Misalnya saja untuk tontonan film dan pagelaran musik, tari, dan/atau busana akan dikenakan pajak sebesar 10%. Sedangkan untuk kontes kecantikan dan sejenisnya akan dikenakan pajak jauh lebih besar yakni 35%.[9]

Seperti yang telah disebutkan diatas bahwa PAD diperoleh melalui beberapa sumber, salah satunya yakni dari menjamurnya keberadaan Pasar Modern dan mall-mall yang menjadi sarana hiburan bagi masyarakat Surabaya yang ikut berkontribusi dalam menambah Pendapatan asli daerah. Kota ini tumbuh dan berkembang dengan banyaknya jumlah mall yang ada disana. Beragam tempat hiburan tersedia didalam mall, seperti tempat bermain dan bioskop, kemudian juga terdapat pusat kebugaran (*fitness center),* pusat refleksi, atau bahkan diskotik. Tidak heran jika banyak masyarakat yang memilih untuk berkunjung ke mall untuk sekedar merefleksikan diri dari pikiran yang stres atau sekedar untuk mencari ketenangan.

Jumlah pusat perbelanjaan ini juga ikut mempengaruhi kontribusi pajak hiburan di Surabaya. Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa pusat perbelanjaan di kota besar menyediakan berbagai tempat hiburan yang sesuai dengan selera masyarakat kota sehingga tidak pernah sepi dari pengunjung. Jumlah pengunjung sebuah pusat perbelanjaan di Surabaya

[9]Idem Hlm 558

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rata-rata mencapai 30.000 orang per hari.[10] Jika dikalikan dengan jumlah pusat perbelanjaan yang ada di Surabaya tentu jumlahnya akan sangat banyak, hal ini tentu akan mempengaruhi kontribusi pajak hiburan yang ada di daerah.

Selain itu pusat-pusat hiburan bukan hanya terletak didalam mall saja. Berbagai pusat hiburan tersebut juga tersebar luas di seluruh wilayah kota Surabaya. Misalnya tempat-tempat karaoke seperti Huppy Puppy, PopCity, InulVista yang jumlahnya lebih dari 1 di wilayah Surabaya. Tempat karaoke tersebut juga ramai dikunjungi oleh masyarakat hal ini tentu akan menjadi pemasukan bagi daerah. Selain itu, beragam konser musik dari berbagai musisi yang berasal dari dalam ataupun luar negeri juga sering diselenggrakan di Kota Pahlawan tersebut. Penyelengaraan konser ini akan menyedot banyak penikmat musik yang tidak jarang datang jauh-jauh dari luar kota sehingga hal tersebut akan menjadi salah satu tarif pengenaan pajak hiburan kota Surabaya.

Pertumbuhan jumlah penduduk juga menjadi alasan mengapa pusat hiburan kota makin berkembang. Tingkat Kelahiran bayi khususnya di Indonesia sendiri terus mengalami peningkatan setiap tahun, di tahun 2018 saja Indonesia telah masuk dalam daftar 5 Negara penyumbang terbesar jumlah kelahiran bayi.[11] Tidak heran bahwa Indonesia menjadi negara

[10]Adisti Dini Indreswari "Kiprah Raja Mal di Kota Pahlawan", (www.Industri.kontan.co.id), Pada 7 September 2018
[11]Bayu Ramadhan, "Wow Indonesia 5 Besar Dunia Penyumbang Kelahiran Bayi Tahun 2018", (www.goodnewsfromindonesia.id), Pada 5 September 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang makin padat penduduk. Jawa timur sendiri merupakan salah satu pulau padat penduduk dengan jumlah individu mencapai 39.500.851 jiwa.[12] Sedangkan, untuk kota Surabaya yang merupakan Ibu Kota Jawa Timur sendiri di tahun 2017 saja jumlah penduduknya sudah mencapai angka 2,87 juta jiwa.[13] Jumlah ini bukanlah angka yang sedikit. Maka dari itu, perkembangan pusat-pusat hiburan baik di Jawa Timur ataupun Surabaya juga ikut mengalami perkembangan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Kota Surabaya memang menjadi salah satu kota yang padat penduduk. Karena menjadi Ibu Kota Jawa Timur maka banyak masyarakat luar yang merantau ke Surabaya untuk mencari ladang pekerjaan. Hal ini tentu menyababkan kota tersebut menjadi padat penduduk sehingga mengakibatkan terjadinya berbagai aktifitas ekonomi salah satunya yakni para perantau yang akhirnya bekerja di banyak pusat hiburan yang ada di Surabaya. Selain itu, para perantau yang datang juga berasal dari pemuda pemudi yang ingin menimba ilmu di kota Surabaya. Ada yang dari tingkat Sekolah Dasar sampai tingkat Universitas. Keberadaan mereka pun turut menambah jumlah penduduk di Surabaya dan juga ikut menyumbangkan angka kenaikan jumlah pajak hiburan di kota tersebut.

[12] BPS Jawa Timur "Jumlah Individu Jawa Timur Tahun 2017" (www.jatim.bps.go.id), Pada 5 September 2018
[13] BPS Surabaya, "Jumlah Individu Kota Surabaya Tahun 2017", (www.Surabayakota.bps.go.id), Pada 5 Septemeber 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain pajak hiburan, pengenaan pajak daerah yang juga cukup berkontribusi dalam PAD kota Surabaya yakni pajak reklame. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa sebagai kota besar, Surabaya tentunya memiliki berbagai aktifitas ekonomi dan juga banyak transaksi ekonomi yang terjadi. Beragam penawaran pun ada, mulai dari makanan, tempat hiburan, tempat wisata, jasa, dan masih banyak lagi. Hal-hal tersebut diatas sering dipromosikan melalui berbagai iklan salah satunya melalui pemasangan reklame. Reklame ini telah menjadi media promosi yang cukup digemari oleh para pengusaha di kota-kota besar.[14] Sejauh ini, reklame masih menjadi sarana yang efektif untuk memperkenalkan barang, jasa, dan lain-lain yang ingin kita perkenalkan ke khalayak umum.

Pemasangan reklame ini juga macam-macam bentuknya bisa berupa reklame peragaan, reklame selebaran, papan, stiker, kain dan lain-lain. Sebagai kota besar tentunya banyak perusahaan-perusahaan baik dari dalam ataupun luar kota yang mempromosikan produknya melalui pemasangan reklame dikota Surabaya. Hal ini tentu berdampak pada pengenaan pajak reklame daerah. Semakin banyak perusahaan yang mempromosikan produknya lewat pemasangan reklame, maka akan semakin banyak pula pemasukan yang didapat oleh kota Surabaya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa berkembangnya suatu kota juga dinilai dari seberapa banyak jumlah reklame yang dipasang ditempat-

[14] Cermati, "Pajak Reklame, Apa Itu? Bagaimana Perhitungannya?", (www.cermati.com), Pada 11 Februari 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat strategis di jalan-jalan besar yang ada di kota tersebut. Pemasangan reklame ini akan menimbulkan kesan ramai dan juga cara yang efektif dalam mempromosikan sebuah produk.[15] Tidak terkecuali kota Surabaya, di kanan-kiri jalanan kota banyak terpasang berbagai macam reklame dengan macam-macam ukuran dan jenis. Reklame dengan jenis dan ukurannya masing-masing memiliki tarif pengenaan pajak yang berbeda.

Kontribusi kedua pajak tersebut diharapkan mampu menaikkan PAD Surabaya sehingga kota Surabaya menjadi mandiri dan tidak bergantung kepada pemerintahan pusat. Kemandirian ini yakni berupa kemandirian dalam perencanaan maupun dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Kemandirian yang tinggi nantinya akan memperkuat ketahanan ekonomi daerah dalam menghadapi gejolak perekonomian nasional maupun internasional yang pada akhirnya mempengaruhi besar-kecilnya penerimaan bantuan dari pusat yakni pemerintahan yang meliputi efisiensi dalam pengeluaran pemerintah; kelemahan ekonomi pasar; pembangunan ekonomi daerah dan pertumbuhan.[16] Maka kemadirian ini merupakan tujuan penting yang diharapkan mampu dicapai oleh kota Surabaya nantinya. Karena dengan demikian Surabaya tidak akan terus mengharapkan bantuan dari pemerintahan pusat.

[15] Idem
[16] Rahardjo Adisasmita, "Pembiayaan Pembangunan Daerah"(Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011) Hlm 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, Surabaya juga diharapkan mampu membiayai pembangunannya agar bisa menjadi kota yang lebih baik. Apabila PAD kota Surabaya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yang sebagian besar didapatkan dari sektor pajak, maka kemampuan kota untuk dapat menutupi semua anggaran belanja daerah akan tercapai dan bisa menjadi daerah yang mandiri dan tidak akan menjadi beban bagi pemerintahan pusat lagi. Disamping itu, dengan tigkat PAD yang tinggi, Surabaya justru akan sangat dapat membantu negara dalam bersumbangsih ke PDB Nasional. Dampak dari meningkatnya PDB Nasional ini, tentu akan menjadikan negara memiliki dana yang cukup untuk membiayai kehidupan bernegara seperti infrastruktur, kebutuhan pangan, dan lain-lain. Hal ini tentu dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia.

Kota Surabaya memang telah banyak mengalami peningkatan dan perkembangan yang cukup berarti. Selain itu, kota yang juga mendapat gelar sebagai kota pahlawan ini mengalami kenaikan PAD yang bisa dibilang signifikan setiap tahun sehingga dapat dikatakan memuaskan.[17] Melihat berbagai fenomena di atas, maka peneliti pun tertarik untuk menganalisis Kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Surabaya. Agar dapat mengetahui dan memenuhi tujuan-tujuan diatas, maka akan diteliti lebih lanjut terkait

[17] Wardhono, et al. "Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pembangunan Kota Surabaya" (https://repository.stiesia.ac.id), Pada 15 September 2018)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kontribusi kedua pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Surabaya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kontribusi dan perkembangan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli daerah Surabaya tahun 2013-2017?
2. Bagaimana kontribusi dan perkembangan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli daerah Surabaya tahun 2013-2017?

C. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui berapa persen pengaruh dan bagaimanakah tren dari pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli daerah Surabaya tahun 2013-2017.
2. Mengetahui berapa persen pengaruh dan bagaimanakah tren dari pajak reklame terhadap Pendapatan Asli daerah Surabaya tahun 2013-2017.

D. Manfaat penelitian

Bagi Penulis

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat Pendapatan Asli daerah di Surabaya dan bagaimanakah kontribusi kedua pajak yang sedang berkembang di kota-kota besar seperti Surabaya yaitu pajak hiburan dan pajak reklame.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dan literatur dalam membuat kebijakan terkait Pendapatan Asli Daerah Surabaya dan pengaruhnya bagi pajak hiburan dan pajak reklame.

Bagi Masyarakat

Sebagai bentuk informasi untuk masyarakat bagaimana pajak hiburan dan pajak reklame dapat menjadi sumber pendapatan yang berkontribusi terhadap PAD Surabaya dan menjadi pemasukan daerah yang cukup signifikan, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan tersebut dan dapat digunakan sebagai sarana mencari pekerjaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan teori

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meupakan penghasilan dari suatu daerah yang bersumber dari retribusi, pajak, dan pendapatan lain-lain yang dianggap sah dari wilayah itu sendiri serta dipungut berdasar pada undang-undang yang berlaku. PAD merupakan cerminan dari seberapa besar peningkatan yang telah dialami suatu daerah dan menjadi tolak ukur untuk menilai sejauh mana perkembangan ekonomi wilayahnya. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen yang ada didalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN).[18] PAD ini berfungsi untuk memuaskan masyarakat daerah sendiri, karena berbagai kegiatan yang ada di daerah nantinya akan dibiayai dari dana PAD ini. Dana PAD dapat dipergunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di daerah. Misalnya, masalah pengangguran, inflasi dan kemunduran ekonomi. Masalah pengangguran dapat teratasi dengan dana PAD, karena seperti yang disebutkan sebelumnya dana PAD akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan perekonomian yang ada

[18] Ahmad Yani Loc. cit Hlm 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di daerah, salah satunya pembiayaan UMKM, berdirinya UMKM ini tentu akan mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Surabaya. Maka dari itu, PAD dapat mengatasi permasalahan yang ada disuatu daerah.

2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, ditentukan bahwa sumber-sumber pembiayaan Pendapatan Asli Daerah yakni:

a. Pajak daerah, pajak merupakan sumber pembiayaan bagi negara. Hal tersebut dikarenakan pendapatan yang masuk ke negara sebagian besar dananya berasal dari pembayaran pajak dan pembiayaan untuk negara pun juga mayoritas didapat dari uang pajak. Pajak sendiri merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang–Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar–besarnya kemakmuran rakyat.[19] Berdasarkan definisi tersebut maka masing-masing perorangan memiliki kewajiban atas pajak. Pajak dikenakan dalam berbagai hal seperti pengenaan pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, dan masih banyak lagi. Pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk berbagai kepentingan negara, salah satunya yakni pembenahan infrastruktur. Misalnya saja untuk perbaikan jalan raya,

[19] Timbul Hamongan Simanjuntak dan Mukhlis Imam, " Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi"(Jakarta: Raih Asa Sukses. 2012) Hlm 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengadaan alat transportasi umum, dan pembenahan taman-taman kota. Hal tersebut dapat terlaksana dengan lancar apabila masyarakat yang berperan sebagai wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan benar. Maka dari itu sangat diperlukan kerjasama dari masyarakat luas apabila suatu negara ingin mengalami perubahan ke arah yang lebih baik.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan program-program pembangunan berupa investasi masyarakat bagi sebesar-besarya kemakmuran rakyat.[20] Pajak berdasarkan pembagian antar tingkat pemerintah di suatu negara dibagi atas pajak pusat dan pajak daerah .[21] Setiap daerah sejatinya memiliki tarif masing-masing dalam penetapan pengenaan pajak daerahnya. hal ini tentu disesuaikan dengan karakterikstik tiap daerah dan kemampuan ekonomi daerah tersebut.

Pajak daerah memilki ciri-ciri yaitu pajak hanya dipungut dalam wilayah yang termasuk dalam administrasi. Artinya, apabila kita berbicara pajak daerah di wilayah Surabaya, maka pajak hanya berlaku saat si wajib pajak berada di kota Surabaya. Apabila si wajib pajak berada diluar daerah Surabaya maka ia harus mengikuti aturan

[20]Idem
[21]Irwansyah Lubis dan Lubis Abidah Sari, Lubis Muhammad Zuhdi, “Taat Hukum Pajak”(Jakarta: Wacana Media. 2018) Hlm 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pajak daerah lain yang sedang ia tempati, bukan lagi aturan pajak daerah Surabaya. Selain itu, pajak daerah hanya digunakan untuk membiayai keperluan dan kebutuhan di dalam lingkup pemerintahan daerah saja. Jika wilayah Surabaya sedang membutuhkan dana untuk pembenahan infrastruktur maka biayanya dapat diambil dari hasil pajak daerah Surabaya, dan tidak diperkenankan menggunakan dana tersebut untuk wilayah diluar kota Surabaya.

b. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.[22] Selain pajak daerah, yang juga berperan penting dalam pemasukan daerah yaitu retribusi daerah. Retribusi ini merupakan pemasukan daerah yang terkait dengan perizinan kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan. Jenis-jenis retribusi daerah yang diatur dalam peraturan daerah seperti kegiatan pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pemakaman dan pengabuan, pelayanan pasar dan masih banyak lagi.[23]

Banyak dari masyarakat yang beranggapan bahwa pajak dan retribusi adalah hal yang sama. Bahkan mereka menganggap bahwa jika sudah membayar pajak maka mereka juga telah memenuhi kewajiban dalam pembayaran retribusi. Anggapan tersebut muncul dikarenakan

[22]Jeni Susyanti dan Dahlan Ahmad, "Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi" (Malang: Empatdua Media. 2016), Hlm 266
[23] Idem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat lebih sering berhadapan dengan situasi yang mewajibkan mereka untuk membayar biaya retribusi dibanding pajak. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pembayaran retribusi meliputi perizinan seperti kesehatan dan pelayanan pasar, hal-hal tersebut merupakan beragam kegiatan yang lebih *familiar* untuk dilakukan sehari-hari. Dengan demikian, banyak masyarakat yang menganggap bahwa membayar pajak sama dengan membayar retribusi daerah.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa banyak dari masyarakat kita yang belum faham apa itu retribusi dan perbedaanya dengan pajak. Berikut merupakan perbedaan pajak dan retribusi yang disajikan dalam bentuk tabel 2.1 berikut ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2.1 Perbedaan Pajak dan Retribusi

Perbedaan	Pajak	Retribusi
Dasar Hukum	Di dalam UUD 1945 Pasal 23A dijelaskan bahwa membayar pajak merupakan sebuah kewajiban bagi setiap masyarakat dan sifatnya memaksa karena dipergunakan untuk keperluan negara yang telah diatur dalam undang-undang	Retribusi dipungut berdasarkan aturan dari pemerintah, aturan menteri dan juga peraturan daerah
Balas Jasa	Pajak merupakan salah satu bentuk dari pemerataan pendapatan warga negara. Akan tetapi, imbal balik dari pembayaran pajak tersebut tidak langsung dirasakan oleh masyarakat yang membayar. Balas jasa yang akan diterima dari pembayaran pajak tersebut misalnya berupa infrastruktur dan perbaikan jalan raya.	Balas jasa dari pembayaran retribusi dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Misalnya saja untuk pembayaran retribusi di bidang kebersihan, maka bagi masyarakat yang membayar biaya retribusi tersebut dapat langsung merasakan manfaatnya berupa sampah yang langsung diambil oleh petugas kebersihan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Objek	Contohnya berupa pajak kendaraan bermotor, pajak barang mewah, dan pajak penghasilan.	Orang atau badan yang menggunakan perizinan atau jasa dari pemerintah
Sifat	Pembayaran pajak sifatnya wajib dan memaksa, apabila tidak membayar akan ada konsekuensi yang didapat	Pembayaran retribusi hanya bersifat wajib bagi pihak yang bersangkutan yang telah mendapat izin atau jasa dari pemerintah
Lembaga Pemungut	Untuk lembaga yang bertugas memungut pajak, dibagi menjadi 2 yaitu direktorat pajak dan pajak daerah, yang selanjutnya untuk pengambilan pajak daerah akan ditunjuk salah satu lembaga yang bertanggung jawab untuk memungut misalnya Badan Pengelolaan Pajak dan Keuangan Daerah	Retribusi daerah akan dipungut oleh pemerintah daerah sendiri tidak melalui lembaga seperti Badan Keuangan dan lain-lain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan	Tujuan utamanya yakni untuk meningkatkan ekonomi daerah, kemudian untuk mengurangi ketimpangan, dan untuk memobilisasi surplus ekonomi	Retribusi bertujuan agar masyarakat mendapatkan izin ataupun jasa dari pemerintah terkait layanan yang diberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa pajak dan retribusi merupakan 2 hal yang sanagt berbeda. Retribusi memang erat kaitannya dengan kegiatan yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat lebih sering dihadapkan pada kewajiban dalam pembayaran retribusi daerah.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maksut dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yakni daerah mendapatkan pemasukan dari perusahaan-perusahaan yang dibangun menggunakan uang milik negara baik sebagian atau keseluruhan dan perusahaan tersebut berada di daerah yang bersangkutan. Jadi, pendapatan yang didapatkan dari perusahaan-perusahaan tersebut nantinya akan masuk ke dalam PAD daerah. Hal ini juga diatur didalam undang-undang yakni UU nomer 33 tahun 2004. Dalam undang-undang tersebut objek yang termasuk dalam hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu[24]:

1. Bagian profit/laba dari penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN
2. Bagian profit/laba dari penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD
3. Bagian laba/profit dari penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau k usaha milik masyarakat

[24]Hestanto, "Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Para Cendekiawan), (www.hestanto.web.id), Pada 28 September 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perusahaan-perusahaan yang disebutkan menjadi objek dalam undang-undang tersebut di atas akan menjadi perusahaan yang ikut bersumbangsih dalam PAD serta ikut menjadi salah satu sumber utama pendapatan suatu daerah.

d. Lain-lain pad yang sah. Pendapatan yang termasuk dalam kategori pendapatan lain-lain pad yang sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut[25]:

1. Alokasi dana penyesuaian dianggarkan sebagai pendapatan daerah pada kelompok lain-lain
2. Penganggaran dana otonomi khuus dan dana bantuan operasional sekolah didasarkan pada peraturan menteri keuangan
3. Penganggaran pendapatan kabupaten/Kota yang bersumber dari bagi hasil pajak yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja hasil pajak
4. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun khusus dianggarkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)
5. Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), pemerintah daerah lainnya atau sumbangan pihak ketiga

[25] Soeradi, "Pengelolaan Keuangan Negara di Era Otonomi Daerah"(Yogyakarta:Graha Ilmu. 2014) Hlm 18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dari berbagai penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa rumusan dari Pendapatan Asli Daerah yakni:

PAD = Pajak + Retribusi + Hasil Kekayaan Daerah + Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Hal-hal yang termasuk dalam poin tersebut diatas akan ikut berkontribusi dalam pendapatan asli daerah dan menjadi salah satu sumber penerimaan PAD.

3. Pajak Hiburan

1. Definisi Pajak Hiburan

   Pajak hiburan adalah pajak atas segala penyelenggaraan hiburan yang ada di daerah terkait. Hiburan merupakan semua jenis pertunjukan, permainan, tontonan, atau segala aktifitas keramaian yang dinikmati dan dipungut biaya penyelenggaraannya. Pengenaan pajak hiburan tersebut diatas juga berbeda-beda tiap jenisnya. Misalnya saja untuk tontonan film dan pagelaran musik, tari, dan/atau busana akan dikenakan pajak sebesar 10%. Sedangkan untuk kontes kecantikan dan sejenisnya akan dikenakan pajak jauh lebih besar yakni 35%.

2. Jenis-Jenis Pajak Hiburan

   Pajak hiburan meliputi: tontonan film; pameran; kontes kecantikan, binaraga dan sebagainya; pagelaran musik, tari dan/atau busana; diskotik, klab malam atau sejenisnya; sirkus, akrobat, atau sulap;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permainan bilyard dan golf serta bowling; pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan; refleksi spa/mandi uap, puat kebugaran, panti pijat; pertandingan olahraga. Semua kegitan hiburan yang dikenakan biaya dan termasuk dalam objek diatas maka akan masuk dalam pungutan pajak hiburan.

3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan

   Dasar hukum pengenaan pajak ini terdapat dalam Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009 yakni tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan peraturan daerah nomer 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

4. Objek dan Subjek Pajak Hiburan

   Objek pajakmerupakan jasa adanya penyelengaraan kegiatan hiburan yang dikenakan biaya. Sedangkan untuk subjek dan wajib pajak hiburan yaitu untuk subjek pajaknya adalah orang yang menikmati adanya hiburan tersebut. Untuk wajib pajak hiburan akan dikenakan kepada pihak yang menyelenggarakan hiburan tersebut.

5. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungannya

   Pengenaan pajak hiburan memiliki nilai yang berbeda-beda untuk setiap jenis kegiatan yakni sebagai berikut: a) tontonan film dikenakan 10%, b) pagelaran kesenian 10%, c) pagelaran kesenian yang bersifat tradisional 5%, d) kontes kecantikan dan sejenisnya 35%, e) kontes binaraga dan sejenisnya 10%, f) pameran 10%, g) diskotik, karaoke dan sejenisnya 35%, h) sirkus dan sejenisnya 10%, i) refleksi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sejenisnya 35%, j) pusat kebugaran 10%, k) pertandingan olahraga 15%.[26]

Walaupun memiliki banyak kategori pengenaan pajak, namun rumusan dalam penentuan pajak hiburan yang akan berkontribusi dalam PAD ini adalah sebagai berikut:

Pajak Hiburan = Bioskop + Non Bioskop + Insidentil

3. Pajak Reklame

1. Definisi Pajak Reklame

   Definisi pajak reklame ialah pajak yang dipungut dengan adanya setiap penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial.

2. Jenis-jenis Pajak Reklame

   Pajak reklame meliputi: reklame papan/ lillboard/ videotron/ megatron/ LED dan sejenisnya; reklame kain; reklame melekat/ stiker; reklame selebaran; reklame berjalan; reklame udara; reklame apung; reklame suara; reklame film/slide; reklame peragaan. Sedangkan yang tidak termasuk dalam pengenaan pajak reklame yaitu: reklame melalui internet, televisis, radio, dan sejenisnya; merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan; nama pengenal usaha atau profesi

[26] Diaz Priantara, "Perpajakan Indonesia Edisi 2"(Jakarta: Mitra Wacana Media: 2012) Hlm 558

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang melekat pada bangunan usaha; reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintahan daerah; reklame milik lembaga yang berasal dari pendidikan dan kesehatan yang luasnya tidak melebihi $2m^{2.}$

3. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Reklame

   Pengenaan pajak reklame telah diatur dan terdapat dalam Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009 yakni tentang pajak daerah.

4. Objek dan Subjek Pajak Reklame

   Objek pajak merupakan semua penyelengaraan reklame yang termasuk dalam kategori diatas yang dipasang dalam wilayah terkait. Sedangkan untuk Subjek dan wajib pajak reklame yaitu untuk Subjek pajaknya adalah orang yang menggunakan reklame tersebut. Untuk wajib pajak akan dikenakan kepada pihak yang menyelenggarakan reklame tersebut.

5. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan

   Cara perhitungan pajak reklame yakni ditetapkan pengenaannya sebesar 25% (dua puluh lima persen).[27] Penentuan pajak reklame yang akan berkontribusi dalam PAD ini memiliki rumusan sebagai berikut:

Pajak Reklame = Permanen + Insidentil + Terbatas

4. Hubungan antara Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan PAD

[27] Idem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan penjelasan dan teori yang telah diuraikan diatas, maka hubungan anatara variabel pajak hiburan, pajak reklame dan PAD akan disimpulkan melalui beberapa pendapat dari para ilmuwan berikut:

a. Menurut teori Dubin, pajak yang dipungut dapat meningkatkan PAD yang nantinya akan membawa manfaat bagi daerah dalam melaksanakan program pembangunan dan berbagai pembiayaan daerah lainnya. Pajak hiburan dan pajak reklame ini merupakan beberapa komponen dari jenis-jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi terhadap PAD daerah.[28]
b. Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo mengemukakan pajak merupakan iuran dari rakyat yang akan masuk dalam kas negara memiliki sifat mengikat dan memaksa dengan imbalan secara tidak langsung kepada masyarakat dan diperuntukkan untuk keperluan secara umum.[29] Dalam hal ini pajak yang nantinya akan digunakan untuk keperluan umum adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka dapat disimpulkan bahwa pajak yang didalamnya juga berasal dari pajak hiburan dan pajak reklame ini merupakan komponen PAD yang berkontribusi dalam pajak daerah tersebut.
c. Prof. Dr. P.J. A Andriani menyatakan pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-

[28] Yulia Chandra Ervina, "Pengaruh pemungutan pajak Hotel dan Pajak restoran dan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dinas pendapatan Asli daerah Bekasi", (www.slideshare.net), Pada 5 November 2018
[29] Dwi Sunar Prasetyono, "Buku Pintar Pajak"(Jogjakarta: Laksana. 2012) Hlm 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung bisa ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.[30] Sama seperti teori sebelumnya bahwa yang dimaksut "pengeluaran-pengeluaran umum" dalam teori tersebut adalah berbagai keperluan daerah yang menggunakan dana dari PAD. Sehingga pajak hiburan dan pajak reklame merupakan 2 dari beberapa sumber yang nantinya akan dipergunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum tersebut.

d. Suwarno dan Suhartiningsih (2008) dalam penelitiannya yang berjudul "Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten Sukoharjo)".[31] Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pajak daerah berpotensi untuk terus digali guna meningkatkan penerimaan daerah. Pajak daerah berasal dari beberapa sumber seperti pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengolahan bahan galian, dan pajak pemanfaatan air bawah tanah.[32] Maka dari itu, pajak reklame an pajak hiburan juga memiliki potensi untuk terus digali dan dikembangkan sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

---

[30] Idem

[31] Suwarno dan Suhartiningsih, "Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten Sukoharjo)", (http://etheses.uin-malang.ac.id/1975/6/09510081_Bab_2.pdf), Pada 4 april 2019

[32] Mohammad Zain, "Manajemen Perpajakan"(Jakarta: Salemba Empat: 2003) Hlm 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian yang saya lakukan yaitu dengan judul "Pengaruh Sektor Industri Makanan dan Industri Makanan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2015-2017", saya mengambil beberapa judul penelitian sejenis yang dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian dan analisis yang dilakukan:

1. Penelitian dengan judul "Kontribusi Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang" yang diteliti oleh Dara Rizki Supriadi, dkk. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Pada penelitian ini kontribusi yang digunakan yakni pajak hiburan yang berasal dari penerimaan pajak hiburan, pajak daerah, dam pendapatan asli daerah di kota Malang. Data yang digunakan berupa data sekunder yang berbentuk nilai realisasi dari pajak hiburan, pajak daerah, dan PAD kota Malang.[33]

   Persamaan Judul penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yakni dari variabel X nya yang juga meneliti tentang pajak hiburan danvariabel Y nya tentang Pendapatan Asli Daerah. Selain pada variabel, persamaan yang lain yaitu dari metode yang digunakan yang menggunakan teknik analisis deskriptif yang

[33] Dara Rizki Supriadi, "Kontribusi Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang", Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya, (Malang: Jejak VOL 1, 2015) Hlm 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan perhitungan dengan data sekunder. Sedangkan, untuk perbedaanya yaitu pada penelitian ini hanya menggunakan 1 variabel X dan meneliti wilayah Malang. Sedangkan di dalam judul yang saya teliti terdapat 2 variabel yang berkedudukan sebagai variabel X dan saya meneliti daerah Surabaya.

2. Penelitian dengan judul "Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya" diteliti oleh Reza Arditia. Menurut jurnal yang ditulis oleh Reza Arditia dengan judul, Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya menyatakan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli daerah yang berasal dari masing-masing pos di kota Surabaya masih dianggap kurang.[34] Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah deskriptif. Pada jurnal ini menganalisis pendapatan daerah Surabaya pada tahun 2013 sampai 2015.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan yaitu variabelnya yang menggunakan variabel Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel Y dan lokasi yang diteliti sama-sama kota Surabaya. Sedangkan untuk perbedaanya terletak pada variabel X

[34] Arditia Reza "ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAHKOTA SURABAYA", (http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id), Pada 20 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diteliti. Judul penelitian ini menggunakan 1 variabel X yaitu Pajak Daerah sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan 2 variabel X yaitu pajak hiburan dan pajak reklame.

3. Penelitian dengan judul "Analisis Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya" oleh Reny Rinawati. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Koefisien korelasi antara penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya memiliki hubungan positif atau searah dan juga kuat. Sehingga setiap penambahan pendapatan dari pajak reklame juga mengakibatkan peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, setiap pengurangan pendapatan dari pajak reklame akan mengakibatkan penurunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).[35]

Persamaan yang dimiliki dari penelitian dengan judul Analisis Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya dengan penelitian yang saya lakukan yaitu, variabel PAD sama-sama berkedudukan sebagai variabel Y dalam penelitian ini. Selain itu, wilayah yang diteliti sama-sama mengambil wilayah kota Surabaya dan samasama memiliki variabel X berupa pajak

[35] Rinawati Reny, "Analisis Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya", (http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id), Pada 20 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

reklame. Sedangkan untuk perbedaanya, pada penelitian ini menggunakan 1 variabel X dan penelitian saya memiliki 2 variabel X.

4. Penelitian dengan judul "Analisis Potensi Pajak Hiburan di Kota Manado" oleh Chlief Watuseke dan Sifrid S. Pangemanan. Penelitian ini menggunkan analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif berupaya untuk menjelaskan variabel yang dianalisis tanpa mendeteksi lebih dalam hubungan antar variabel yang diteliti.[36]

   Perbedaan penelitian ini dengan judul yang saya teliti yaitu dari variabel Y nya dan juga lokasi penelitian. Untuk penelitian yang saya ambil menggunakan variabel Y berupa Pendapatan Asli daerah. Sedangka judul ini hanya meneliti satu variabel yakni pajak hiburan. Perbedaan lain antara penelitian saya dengan judul penelitian ini yaitu dari lokasinya. Saya mengambil lokasi kota Surabaya, sementara untuk judul ini mengambil lokasi kota Manado untuk diteliti. Untuk persamaanya, penelitian yang saya lakukan dengan judul penelitian ini yaitu dari varibel yang samasama meneliti tentang pajak hiburan dan analisisnya menggunakan deskriptif kuantitatif.

[36] Watuseke Chlief dkk"AnalisisPotensi Pajak Hiburan di Kota Manado", Jurnal Universitas Sam Ratulangi Manado (Manado: Jurnal Emba) Hlm 528

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Penelitian dengan judul "Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara" yang ditulis oleh Alfan A. Lamia, David P.E. Saerang, dan Heince R.N Wokas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektifitas penerimaan pajak restoran, pajak penerangan jalan, dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2010-2014, serta berapa besar Kontribusi ketiga pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara dari tahun 2010-2014.

   Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan juga merupakan salah satu bagian dalam Pajak Daerah yang merupakan sumber penerimaan PAD. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum jumlah penerimaan Pajak Daerah dari tahun 2010-2014 mengalami peningkatan yang cukup signifikan di setiap tahunnya. Hal ini tentu dapat membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara guna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran atau belanja dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. [37]

   Persamaan penelitian ini dengan judul penelitian yang saya lakukan yaitu dari variabel Y nya yang sama-sama membahas tentang Pendapatan Asli daerah dan variabel X nya juga meneliti

[37] A. Lamia Alfan Dkk "Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara", Universitas Sam Ratulangi, (Manado: Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 2015) Hlm 789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang pajak reklame. Sedangkan untuk perbedaanya yaitu terletak pada jumlah variabel X dan letak penelitiannya. Untuk penelitian ini mengambil lokasi di Minahasa Utara sedangkan untuk judul penelitian saya mengambil lokasi kota Surabaya. Selain itu untuk perbedaan yang lain juga terletak dari jumlah variabel X nya yang meneliti 3 variabel yakni Pajak Restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan. Sedangkan, penelitian yang saya lakukan meneliti 2 variabel X yaitu pajak hiburan dan pajak reklame.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

	Judul Penelitian	**Persamaan**	**Perbedaan**
1.	Kontribusi Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang	✓ Meneliti Variabel pajak hiburan ✓ Menggunakan metode analisis deskriptif ✓ Menggunakan data sekunder	✓ Hanya memiliki satu variabel X dan daerah yang diteliti yakni kota Malang
2.	Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya	✓ Menggunakan variabel Y Pendapatan Asli Daerah ✓ Lokasi penelitian kota Surabaya	✓ Variabel x yang digunakan hanya 1 yaitu Pajak Daerah sedangkan judul penelitian saya menggunakan 2 variabel X yaitu pajak hiburan dan pajak reklame
3.	Analisis Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya	✓ Menggunakan variabel Y Pendapatan Asli Daerah ✓ Lokasi penelitian kota Surabaya ✓ Variabel X meneliti tentang pajak reklame	✓ Variabel x yang digunakan hanya 1 yaitu Pajak Reklame sedangkan judul penelitian saya menggunakan 2 variabel X yaitu pajak hiburan dan pajak reklame
4.	Analisis Potensi Pajak Hiburan di Kota Manado	✓ Meneliti variabel pajak hiburan ✓ Menggunakan analisis deskriptif kuantitatif	✓ Penelitian ini mengambil lokasi kota Manado sedangkan judul penelitian saya menganalisis kota Surabaya ✓ Penelitian ini hanya meneliti tentang pajak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			hiburan, sedangkan penelitian saya menggunakan variabel pajak hiburan, pajak reklame, dan PAD
5.	Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa	✓ Meneliti variabel Pendapatan Asli daerah yang berkedudukan sebagai variabel Y ✓ Variabel X nya juag meneliti tentang pajak reklame	✓ Lokasi yang diteliti adalah kabupaten Minahasa sedangkan judul penelitian saya meneliti kota Surabaya. ✓ Variabel X dalam penelitian ini memiliki 3 variabel yaitu menggunakan Pajak restoran, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan. Sedangkan judul penelitian saya menggunakan 2 variabel X yaitu pajak hiburan dan pajak reklame

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

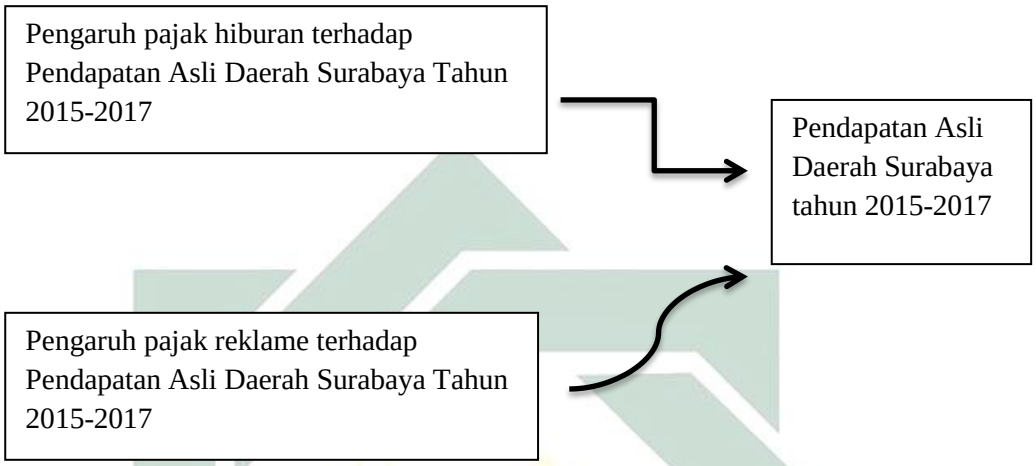

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menjelaskan dan menggambarkan suatu variabel. Menurut Nazir (1988:63) metode deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk meneliti suatu objek dan juga kondisinya, terhadap peristiwa yang terjadi di masa sekarang.[38] Tujuan dari penelitian dengan pendekatan deskriptif adalah untuk menjelaskan serta menggambarkan fenomena yang terjadi berdasarkan fakta-fakta yang ada, serta hubungan antar fenomena yang terjadi. Didalam dunia pendidikan, metode deskriptif ini berfungsi untuk pemecahan praktis suatu masalah dibanding untuk pengembangan ilmu.[39] Sehingga, hasil daripada penelitian ini bisa digunakan untuk memecahkan berbagai permasalahan yang ada di masa sekarang yang tentunya berguna untuk mengatasi berbagai fenomena yang ada di suatu negara. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu kota Surabaya pada khususnya untuk mengetahui seberapa pajak hiburan dan pajak reklame terhadap realisasi PAD kota Surabaya pada tahun 2015-2017.

[38] Admin, "Pengertian dan Jenis Metode Deskriptif", (www.Idtesis.com), Pada 8 November 2018
[39] Soendari Tjutju, "Jurnal Metode Penelitian Desktiptif", (http://file.upi.edu), Pada 8 November 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada penelitian skripsi ini akan meneliti dan membandingkan serta menarik kesimpulan dari hasil pendapatan asli kota Surabaya beberapa tahun 2015-2017. Sehingga kita dapat mengetahui apakah pendapatan asli daerah Surabaya selama 3 tahun tersebut mengalami kenaikan atau justru sebaliknya. Penelitian ini juga akan lebih memfokuskan seberapa besar kontribusi dari pajak hiburan dan pajak reklame terhadap PAD kota Surabaya.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Adapun waktu dan tempat untuk melakukan penelitian ini yaitu pada tahun 2018 dan bertempatan di kota Surabaya. Data yang digunakan diambil langung dari Badan Pengelolaan dan Pajak Daerah kota Surabaya. Penelitian ini juga mengambil berbagai macam referensi dari web-web resmi pemerintah dan web terpercaya lainnya yang memiliki keterkaitan dengan judul. Data yang digunakan mulai dari rentang waktu tahun 2015-2017.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini akan membandingkan hasil Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2015-2017 di Surabaya, kemudian menjelaskannya dan menyimpulkan bagaimana perkembangan Pendapatan Asli Daerah Surabaya pada tahun tersebut. Kemudian, peneliti juga akan menghitung bagaimana kontribusi pajak hiburan dan pajak reklame, sehingga data yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan yakni jumlah yang dicapai dari pajak hiburan dan pajak reklame kota Surabaya di tahun 2015-2017 dan juga data Realisasi Pendapatan Asli Daerah kota Surabaya pada tahun yang sama.

D. Definisi Operasional

Definisi Operasional ini akan menjelaskan masing-masing variabel yang digunakan untuk analisis data, kemudian pengertian dari variabel tersebut dan juga satuan yang digunakan dalam perhitungan.

1. Variabel Pendapatan Asli Daerah Surabaya (Y)

   Merupakan suatu angka yang disajikan untuk menunjukkan seberapa besar pendapatan kota Surabaya yang didapatkan dalam satu tahun. Biasanya data ini disajikan dalam bentuk jutaan atau milyaran rupiah. Data PAD kota Surabaya saya dapatkan langsung dari Badan Keuangan dan Pajak Daerah. Data tersebut menunjukkan Realisasi PAD setiap bulannya dari tahun 2015-2017.

2. Variabel Pajak Hiburan (X1)

   Merupakan suatu angka yang disajikan untuk menunjukkan seberapa besar nilai yang didapat oleh kota Surabaya dalam memperoleh pajak dari sektor hiburan. Data ini saya dapatkan langsung dari Badan Keuangan dan Pengelolaan Pajak kota Surabaya. Data disajikan per bulan mulai dari tahun 2015-2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Variabel Pajak Reklame (X2)

Merupakan suatu angka yang disajikan untuk menunjukkan seberapa besar nilai yang didapat oleh kota Surabaya melalui pajak reklame. Data yang digunakan bersumber dari langsung dari Badan Keuangan dan Pengelolaan Pajak kota Surabaya dan disajikan per bulan dari rentang waktu tahun 2015-2017.

E. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian dengan judul "Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Reklame tehadap Pendapatan Asli Daerah" ini merupakan data dalam bentuk time series yang disajikan per bulan dalam rentang waktu 3 tahun mulai dari tahun 2015-2017. Data yang diambil merupakan data sekunder. Untuk variabel X dan Y sama-sama diambil langsung dari Badan Keuangan dan Pajak Daerah kota Surabaya sehingga data yang diperoleh merupakan data sekunder karena data yag diperoleh sudah dalam bentuk olahan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yakni suatu cara yang harus dilakukan untuk memperoleh sebuah data melalui proses dan ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Teknik Dokumentasi dengan cara mengumpulkan data dari tiap-tiap variabel melalui internet, buku, jurnal, dan juga mengambil langsung ke Lembaga yang bersangkutan. Selain itu, berbagai referensi seperti web-web pemerintahan dan web terpercaya juga membantu peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam analisis.

2. Teknik Wawancara dengan menanyakan beberapa informasi terkait dengan variabel-variabel yang dianalisis kepada pihak Badan Keuangan dan pengelolaan Pajak Daerah Surabaya.

Data yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya. Semua data yang didapatkan peneliti berasal langsung dari Lembaga yang dibutuhkan yakni Badan Keuangan dan Pajak Daerah kota Surabaya.

G. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data merupakan sebuah cara dan runtutan untuk dapat memperoleh hasil dari penelitian yang ingin dilakukan sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian Kuantitatif. Penelitian Kuantitatif merupakan sebuah penelitian yang menuntun si peneliti untuk mencari sebuah permasalahan, kemudian menyusun hipotesisnya, menemukan metodologi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alat-alat analisis yang digunakan.[40] Berikut merupakan teknik analisis yang akan digunakan untuk mengolah data:

- ✓ Mencari data tiap variabel yang dibutihkan via online yakni di web-web resmi milik pemerintahan.
- ✓ Jika data tidak tersedia di web, maka mencari data langsung dari sumbernya.
- ✓ Data yang dibutuhkan yakni data pajak dan PAD kota Surabaya, maka data diambil dari Badan Keuangan dan Pengelolaan Pajak kota Surabaya.
- ✓ Pengambilan data yang langsung diambil dari pemerintah harus melalui tahapan dan prosedur yang cukup panjang, yakni mengurus surat perizinan penelitian ke pihak fakultas untuk diajukan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) sambil menyertakan berkas-berkas yang dibutuhkan seperti Surat Persetujuan Dosen Pembimbing dan Laporan bab satu. Setelah itu, akan ada surat rujukan dari Bakesbangpol yang ditujukan ke Instantsi terkait yakni ke Badan Keuangan dan Pengelolaan Pajak.
- ✓ Setelah mendapatkan surat rujukan, barulah bisa mendapatkan data dari instantsi pemerintahan namun harus menunggu surat disposisi dari bagian terkait.

[40] Bungin Burhan, Metodologi Penelitian Kuantitatif , (Jakarta: Kencana, 2017) Hlm 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- ✓ Setelah adanya surat disposisi, langsung dapat mengambil data ke bagian keuangan. Data yang diberikan lengkap dari data pajak sampai realisasi PAD kota Surabaya.
- ✓ Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, maka data dapat diolah melalui microsotf excel. Setelah itu data diubah dalam bentuk diagram untuk mempermudah kita dalam membaca perubahan data.
- ✓ Langkah terakhir yakni melakukan analisis dan menjabarkan sesuai dengan data yang ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Objek Penelitian

1. Letak Astronomi Kota Surabaya

Kota Surabaya merupakan kota besar kedua setelah Jakarta. Kota Surabaya sendiri merupakan Ibu kota provinsi Jawa Timur. Selain menjadi Ibu kota Jawa Timur, kota ini dikenal juga sebagai kota Pahlawan berdasarkan sejarahnya dikarenakan menjadi salah satu lokasi pertempuran saat melawan Belanda pada saat zaman penjajahan.

Asal-usul nama Surabaya sendiri berasal dari kata Sura dan Baya yang merupakan sama-sama berkedudukan sebagai hewan buas. Menurut sejarahnya, dahulu telah terjadi pertikaian hebat antara hewan sura (hiu) dan baya (buaya) hingga menewaskan kedua hewan buas tersebut, sehingga pada akhirnya daerah perkelahian mereka dinamakan sebagai Surabaya.

Secara astronomis kota Surabaya terletak pada 112 derajat 36'- 112 derajat 54' bujur timur dan 7 derajat 9'- 7 derajat 21' lintang selatan.[41] Adapun batas-batas wilayah kota Surabaya sendiri yakni:

[41] Admin, "Tentang Kota Surabaya", (www.eastjava.com) , Pada 3 Maret 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelah Selatan: Kabupaten Sidoarjo

Sebelah Barat: Kabupaten Gresik

Sebelah Utara: Kabupaten Sampang

Sebelah Timur: Kabupaten Sampang

2. Letak Geografis Kota Surabaya

Secara geografis Ibu kota provinsi Jawa Timur ini berada di tepi pantai utara Jawa Timur, dan berbatasan langsung dengan selat madura di sebelah utara dan timur. Sedangkan di sebelah barat kota ini berbatasa dengan kabupaten Gresik dan kabupaten Sidoarjo di sebalah selatan.[42]

Kota Surabaya berada pada dataran rendah, 3-6 meter diatas permukaan air laut. Hal inilah yang menjadi penyebab suhu udara kota Surabaya Tetapi untuk daerah Lidah dan Gayungan letaknya berada diketinggian 25-50 meter diatas permukaan air laut.

Musim kemarau yang terjadi di kota Surabaya terjadi sekitar bulan Mei-Oktober, sedangkan untuk musim hujan terjadi sekitar bulan April-November.

3. Letak Geologis Kota Surabaya

Struktur tanah kota yang mendapat sebutan sebagai kota Pahlawan ini berasal dari tanah alluvial, hasil endapan sungai dan pantai. Sedangkan di bagian barat kota Surabaya terdapat perbukitan yang mengandung kapur tinggi. Untuk daerah timur dan

[42] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

utara jenis tanahnya berasal dari endapan rawa.[43] Secara geologi kota Surabaya terbentuk oleh batuan sedimen yang berumur Miosen sampai Plistosen. Batuan sedimennya adalah bagian dari lajur Kendeng dengan formasi Sonde, Lidah, Pucangan, dan formasi Kabuh. Batuan dasar untuk kota Surabaya merupakan formasi Lidah yang berumur Pliosen (pre-tertiary). Formasi ini berada pada kedalaman 250 – 300 meter. Selain itu derah Surabaya berupa cekungan endapan aluvial muda hasil endapan laut dan sungai, tuf dan batu pasir.[44]

4. PAD Kota Surabaya

Pendapatan Asli Daerah merupakan segala penerimaan yang diterima oleh suatu daerah. PAD kota Surabaya merupakan jumlah pendapatan yang didapatkan dari wilayah Surabaya yang bersumber pajak, retribusi, hasil kekayaan daerah, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah. PAD merupakan salah satu hal yang utama bagi suatu daerah karena semua pembiayaan daerah akan menggunakan dana yang diambil dari PAD.

Tahun 2015-2017 kota Surabaya memperoleh PAD dengan jumlah yang bisa dikatakan mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan. Data ini diperoleh langsung dari Badan Keuangan dan

[43] Itsmis, "Kenali Karakteristik Kota Surabaya Minimalkan Dampak Gempa", (www.its.ac.id), Pada 5 Maret 2019
[44] Bahri Syaeful dan Madzalim, "Pemetaan Topografi, Geofisika, dan Geologi Kota Surabaya", University Of Surabaya (UNESA), (Surabaya: Jurnal Penelitian Fisika dan Aplikasinya, 2012), Hlm 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengelolaan Pajak kota Surabaya. Berikut merupakan tabel perolehan PAD kota Surabaya selama tahun 2015 sampai tahun 2017:

Tabel 4.1 Data PAD kota Surabaya Tahun 2015-2017

Bulan	**PAD Tahun 2015**	**PAD Tahun 2016**	**PAD Tahun 2017**
Januari	109.124.185.615,00	144.982.812.037,00	128.038.472.382
Februari	111.489.173.645,44	147.649.201.308,00	147.051.801.324
Maret	185.406.160.698,00	220.051.597.765,00	267.099.427.292
April	230.647.881.056,53	265.094.958.986,00	278.350.814.981
Mei	282.945.006.142,00	276.101.139.791,00	358.355.867.924
Juni	360.195.486.878,00	305.754.129.714,00	319.017.297.221
Juli	319.659.259.603,00	361.017.309.929,00	461.037.879.845
Agustus	281.604.652.290,00	310.531.849.062,00	371.634.090.952
September	185.339.404.772,00	190.675.108.070,00	227.562.189.603
Oktober	186.024.611.499,74	211.104.145.438,17	275.290.293.602
November	202.118.527.028,00	225.367.764.899,83	291.497.451.262
Desember	284.345.075.330,65	341.822.493.888,00	470.734.906.346

Sumber data PAD yang telah diolah dari Badan Keuangan

Berdasarkan uraian tabel diatas, dapat dilihat bahwa diawal tahun 2015 perolehan PAD kota Surabaya berada pada kisaran angka 1 milyaran rupiah. Namun, pada pertengahan tahun PAD Surabaya mulai mengalami kenaikan sampai menyentuh angka 3 milyaran rupiah. Namun diakhir tahun, turun menjadi 2 milyaran rupiah tepatnya pada angka Rp 284.345.075.330,65. Hal tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga berlaku sama ditahun 2016 dan tahun 2017. PAD kota pahlawan ini mengalami penurunan dan juga kenaikan. Pada akhirnya di tahun 2017 pada bulan desember Surabaya mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga memperoleh pendapatan sebesar Rp 470.734.906.346,00.

5. Pajak Hiburan Kota Surabaya

Seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa salah satu komponen yang ada didalam PAD yakni berasal dari pajak daerah. Pajak daerah sendiri berasal dari banyak sumber yang salah satunya yakni dari pajak hiburan.

Pajak hiburan berasal dari 3 komponen pajak yakni pajak bioskop, pajak non bioskop, dan insidentil. Sebagai kota besar tentunya banyak kegiatan hiburan yang diselenggarakan di kota Surabaya. Seperti kegiatan tontonan film; pameran; kontes kecantikan, binaraga dan sebagainya; pagelaran musik, tari dan/atau busana; diskotik, klab malam atau sejenisnya; sirkus, akrobat, atau sulap; permainan bilyard dan golf serta bowling; pacuan kuda, kendaraan bermotor, permainan ketangkasan; refleksi spa/mandi uap, puat kebugaran, panti pijat; pertandingan olahraga.[45] Hal-hal tersebut diatas tentu akan menjadi pemasukan bagi daerah.

[45] Diaz Priantara Loc. cit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.2 Pajak Hiburan Kota Surabaya Tahun 2015-2017

	Pajak Hiburan Tahun 2015	**Pajak Hiburan Tahun 2016**	**Pajak Hiburan Tahun 2017**
Januari	4.196.419.694,00	5.445.027.435,00	5.720.435.019
Februari	3.942.560.374,44	4.673.104.978,00	5.375.062.686
Maret	3.504.560.927,00	4.618.013.094,00	4.850.040.811
April	4.557.884.498,53	5.452.431.468,00	5.869.007.015
Mei	5.338.978.624,00	4.848.567.351,00	6.578.385.335
Juni	4.580.905.285,00	5.831.512.084,00	4.774.263.954
Juli	4.377.698.864,00	4.167.477.675,00	4.979.089.080
Agustus	3.747.447.798,00	5.457.686.195,00	6.877.361.935
September	4.639.359.822,00	4.453.485.212,00	5.614.607.590
Oktober	4.935.521.061,00	5.279.234.415,00	6.105.474.554
November	4.765.438.599,00	4.712.436.491,00	6.075.605.791
Desember	5.021.585.258,00	4.954.276.774,00	6.069.513.653

Sumber data pajak hiburan yang telah diolah dari Badan Keuangan

Berdasarkan uraian tabel diatas tabel 4.2 diatas kita dapat melihat bahwa pajak hiburan di kota Surabaya mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Pada tahun 2015 pajak hiburan di Surabaya berada pada angka kisaran 3-4 milyar setiap bulannya. Namun, pada bulan mei dan desember di tahun ini pajak hiburan berhasil mencapai angka 5 milyar rupiah yakni sebesar Rp. 5.021.585.258,00 pada bulan desember. Menginjak tahun 2016, kisaran perolehan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pajak hiburan yang dicapai oleh kota Surabaya yakni sebesar 4-5 milyaran rupiah setiap bulannya. Pada tahun 2017, jumlah pendapatan pajak hiburan per bulannya tidak stabil karena mengalami fluktuasi dari 4 milyar hingga 6 milyar. Namun, pada bulan-buan akhir di tahun 2017 perolehan pajak dari dari bidang hiburan ini stabil pada angka 6 milyar, dan pada bulan desember 2017 pendapatan pajak ini mencapai angka Rp 6.069.513.653,00.

6. Pajak Reklame Kota Surabaya

Selain pajak hiburan, perolehan pendapatan asli daerah kota Surabaya juga didukung dari kontribusi pajak reklame. Sebagai kota besar yang juga merupakan ibukota provinsi Jawa Timur, kota Surabaya tentunya banyak mendapatkan pemasukan dari sektor ini dikarenakan jumlah reklame yang terpasang dijalanan kota Surabaya terbilang cukup banyak.

Pajak reklame sendiri terbagi menjadi beberapa seperti: reklame papan/ lillboard/ videotron/ megatron/ LED dan sejenisnya; reklame kain; reklame melekat/ stiker; reklame selebaran; reklame berjalan; reklame udara; reklame apung; reklame suara; reklame film/slide; reklame peragaan.[46] Berikut merupakan perolehan yang diterima kota Surabaya melalui pajak reklame pada tahun 2015-2017:

[46] Idem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 4.3 Pajak Reklame Kota Surabava Tahun 2015-2017

Bulan	**Pajak Reklame Tahun 2015**	**Pajak Reklame Tahun 2016**	**Pajak Reklame Tahun 2017**
Januari	8.966.497.050,00	8.514.614.488,00	8.474.776.900
Februari	8.740.337.450,00	12.216.985.179,00	6.788.294.700
Maret	12.890.833.500,00	13.072.198.100,00	12.088.780.800
April	9.549.582.900,00	11.718.876.200,00	10.695.527.500
Mei	6.755.880.000,00	8.463.951.500,00	11.509.746.500
Juni	9.510.940.300,00	11.917.706.375,00	6.334.672.200
Juli	5.289.365.200,00	7.386.167.600,00	10.083.548.000
Agustus	13.236.203.700,00	11.813.476.050,00	14.204.972.000
September	8.849.155.600,00	12.280.749.500,00	13.192.013.200
Oktober	11.631.789.625,00	12.325.222.400,00	15.091.478.600
November	9.690.625.200,00	13.588.779.000,00	11.041.004.900
Desember	10.638.008.200,00	8.993.140.600,00	11.792.329.200

Sumber data PAD yang telah diolah dari Badan Keuangan

Berdasarkan uraian tabel diatas, pajak reklame kota Surabaya selama 3 tahun tersebut mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Pada tahun 2015 perolehan pajak ini berkisar antara 8 hingga 13 milyar setiap bulannya. Namun, kenaikan dan penurunan pendapatan dari sektor pajak ini cenderung tidak stabil dan jumlah nominal perubahannya cukup jauh setiap bulan. Hal tersebut juga berlaku di 2 tahun berikutnya yakni pada 2016 dan 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selama 3 tahun tersebut, perolehan pajak paling besar yakni di tahun 2017, tepatnya bulan oktober dengan jumlah perolehan mencapai Rp 15.091.478.600,-.

B. Analisis Data

1. Perolehan PAD, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame 2015-2017

Berdasarkan uraian dan teori yang ada maka Pendapatan Asli Daerah kota Surabaya terdiri dari 4 komponen utama yakni: a) Pajak Daerah, b) Retribusi Daerah, c)Pendapatan Daerah Lain-lain yang Sah, d) Hasil Kekayaan Daerah. Kontribusi pajak hiburan dan pajak reklame dapat diamati melalui data yang bersumber langsung dari Badan Keuangan dan Pengelolaan Pajak kota Surabaya.

Gambar 4.1

Grafik Perolehan PAD, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame 2015-2017

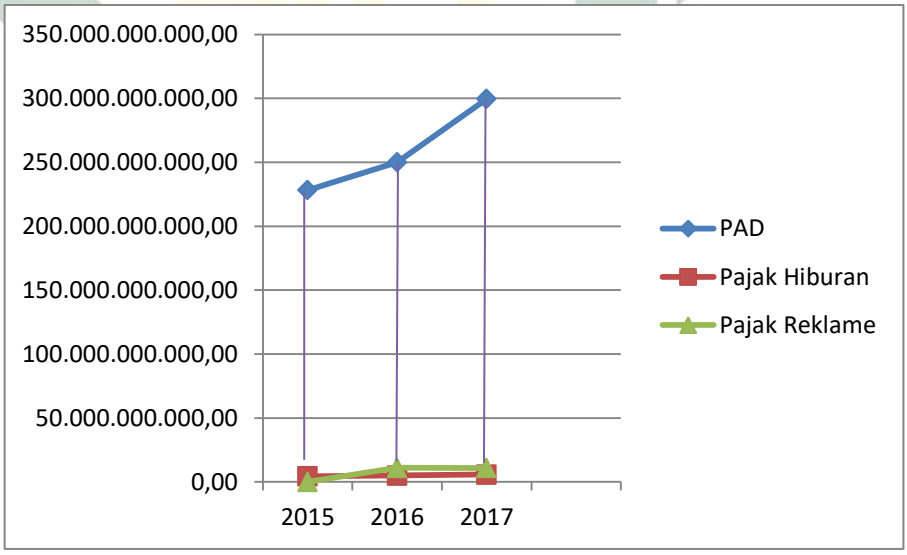

Grafik perolehan PAD, pajak hiburan dan pajak reklame diatas memperlihatkan bagaimanakah perubahan fluktuasi dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerimaan ketiga komponen tersebut selama tahun 2015 sampai 2017. Untuk komponen PAD yang bertanda garis biru dapat dilihat bahwa mengalami kenaikan yang cukup signifikan disetiap tahunnya. Pada tahun 2015 perolehan rata-rata PAD kota Surabaya mencapai kisaran angka Rp 230.000.000.000,00. Kemudian ditahun berikutnya yakni pada 2016 kenaikan perolehan PAD didapatkan cukup banyak kurang lebih penambahannya sebesar 20 milyaran rupiah sehingga pada taun tersebut PAD kota Surabaya mencapai angka Rp 250.000.000.000,00. Tidak cukup disitu, kenaikan yang jauh lebih besar dialami oleh kota yang bergelar pahlawan ini dengan tingkat kenaikan yang pada akhirnya mencapai rata-rata perolehan PAD tahun 2017 menjadi Rp 300.000.000.000,00.

Berdasarkan grafik perolehan diatas, untuk pajak hiburan dan pajak reklame memang tidak terlihat nominal perolehan rata-rata tiap tahunnya. Namun, dapat dilihat dari pergerakan kedua garis yang masing-masing mewakili pajak hiburan dan pajak reklame bahwa kedua pajak tersebut juga mengalami peningkatan di setiap tahunnya walaupun kenaikannya tidak signifikan.

Jika dibandingkan dengan jumlah kenaikan yang dialami pendapatan asli daerah kota Surabaya kenaikan pada pajak reklame dan pajak hiburan tidak mengalami kenaikan yang sebanding dengan PAD pada tahun 2015-2017. Hal tersebut menandakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa ada sektor-sektor lain yang mengakibatkan PAD Surabaya mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan bukan disebabkan karena kenaikan pajak hiburan dan pajak reklame.

Seperti yang telah dikemukakan diatas bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri dari beberapa komponen seperti pajak, retribusi, hasil kekayaan daerah, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah.[47] Kenaikan PAD yang cukup signifikan tersebut bisa jadi berasal dari sektor lain seperti retribusi, hasil kekayaan daerah, atau pendapatan daerah lain-lain yang sah, atau bisa jadi juga berasal dari sektor pajak namun berasal dari pajak daerah selain sektor pajak hiburan dan pajak reklame.

Jika dilihat dari perolehan pajak hiburan dan pajak reklame pada tahun 2015-2017 kemudian kita bandingkan dengan perolehan PAD pada tahun yang sama, maka selisih pendapatan dari PAD dengan kedua pajak tersebut sangatlah jauh yakni mencapai angka 218 hingga 293 milyar rupiah. Tentu nominal ini bukanlah jumlah yang sedikit. Hal tersebut menandakan bahwa perolehan pajak hiburan dan pajak reklame di kota Surabaya pada 3 tahun tersebut tidak banyak berkontribusi dalam pendapatan asli daerah.

[47] Afrilyanita Ery H, "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Probolinggo pada Era Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004"Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang, Vol 1 No 1 2009, Hal 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut merupakan data yang didapatkan dari Badan Keuangan dan Pajak Daerah kota Surabaya tentang perolehan pajak daerah dari keseluruhan sektor pada tahun 2015-2017:

Tabel 4.4

Tabel Perolehan Tahun 2015-2017

Pajak Daerah	**Tahun 2015**	**Tahun 2016**	**Tahun 2017**
Pajak Hotel	187.821.983.629,85	216.178.680.532,00	233.793.472.823
Pajak Restoran	289.180.317.131,54	330.838.390.097,00	386.793.643.531
Pajak Hiburan	53.608.360.804,97	59.893.253.172,00	68.888.847.423
Pajak Reklame	115.749.218.725,00	132.291.866.992,00	131.297.144.500
Pajak PPJ	346.183.406.470,00	356.557.500.416,00	386.520.245.146
Pajak Air Tanah	1.423.961.530,00	1.465.716.300,00	1.471.641.800
Pajak Parkir	56.491.583.995,00	65.807.572.959,00	75.002.121.630
PBB	834.028.175.318,00	851.202.583.297,00	1.009.885.429.350
BPHTB	854.412.416.954,00	985.916.947.123,00	1.302.017.946.531

Jika dilihat dari perolehan angka diatas maka dapat kita simpulkan bahwa pendapatan paling besar selama 3 tahun tersebut adalah dari sektor BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Pada tahun 2015 kota Surabaya memperoleh BPHTB sebesar Rp 854.412.416.954,00. Jika dibandingkan dengan perolehan pajak hiburan dan pajak reklame di tahun yang sama tentu jumlah ini sangatlah berbanding jauh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Begitu pula dengan perolehan di tahun 2016 dan 2017 yang mana BPHTB kota Surabaya terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan sehingga pada 2017 nilai perolehannya mencapai angka Rp 1.302.017.946.531,00. Sedangkan untuk sektor pajak hiburan dan pajak reklame di tahun yang sama hanya memperoleh pendapatan sebesar Rp 68.888.847.423,00 dan Rp 131.297.144.500,00. Hal ini menunjukkan bahwa selama 3 tahun tersebut kontribusi pajak hiburan dan pajak reklame jauh lebih kecil dibandingkan kontribusi BPHTB.

Selain BPHTB perolehan terbesar kedua yang dalam pendapatan asli daerah kota Surabaya tahun 2015-2017 yaitu dari sektor PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Perolehan PBB dengan BPHTB juga tidak memiliki selisih yang terlalu jauh. Di tahun 2015 perolehan PBB kota yang mendapat julukan Pahlawan ini mencapai angka Rp 834.028.175.318,00 yang mana selisihnya juga tidak jauh dari perolehan BPHTB di tahun yang sama. Begitu pula dengan pendapatan dari sektor PBB di tahun 2016 yang berhasil mencapai angka Rp 851.202.583.297,00. Walaupun kenaikannya tidak banyak bila dibandingkan dengan perolehan BPHTB yang mengalami kenaikan cukup signifikan dari tahun 2015 ke 2016, namun pendapatan asli daerah di sektor PBB tersebut tetap menjadi perolehan terbesar kedua dari keseluruhan sektor yang ada didalam pajak daerah selama tahun 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 2017, PBB kota Surabaya mengalami peningkatan yang bisa dibilang cukup banyak karena melonjak dari perolehan angka sebesar 8 Milyaran rupiah menjadi Rp 1.009.885.429.350,00.

Berikut merupakan perbandingan perolehan setiap sektor dari pajak daerah yang disajikan dalam diagram batang:

Gambar 4.2

Grafik Perolehan Pajak Daerah Tahun 2015-2017

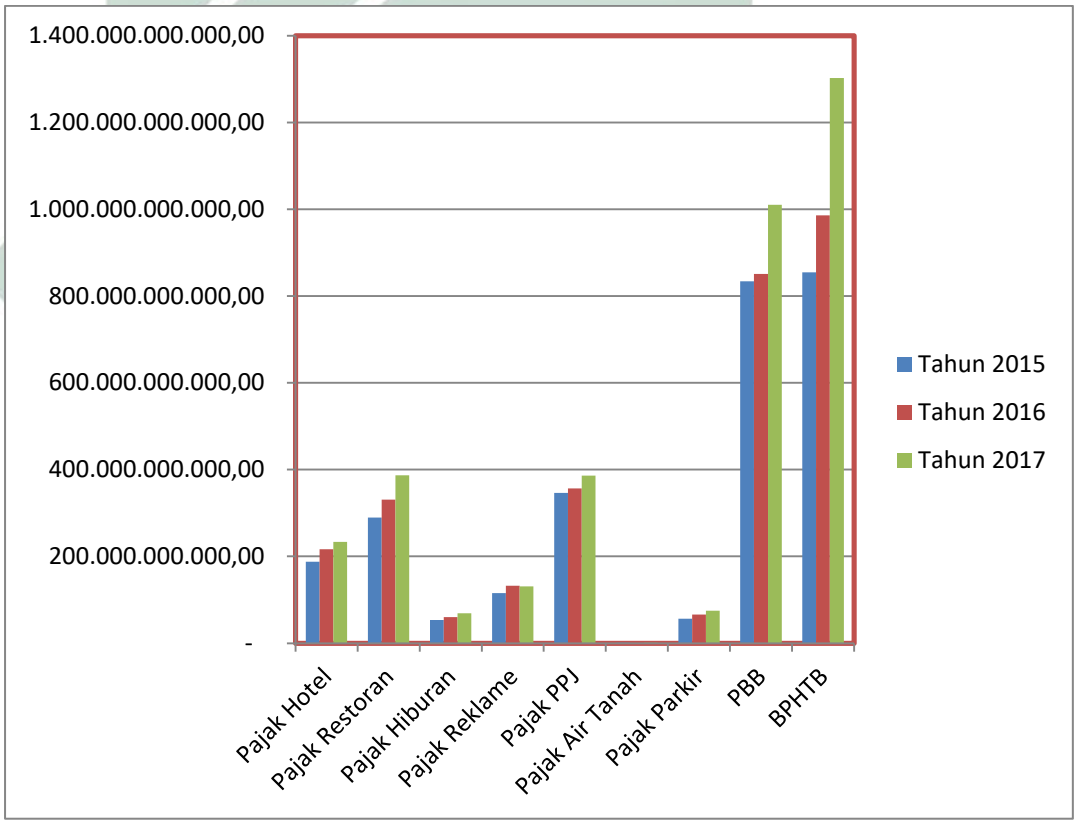

Seperti yang sudah dikemukakan diatas, bahwa BPHTB dan PBB menjadi sektor penyumbang PAD paling besar diantara sektor lain yang menjadi komponen penyusun pajak daerah. Grafik diatas membuktikan bahwa di tahun 2015-2017 BPHTB menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapatan tertinggi bagi PAD kota Surabaya. Jika dibandingkan dengan perolehan pajak hiburan dan pajak reklame yang terdapat pada grafik, maka perbandingannya bisa dibilang sangat jauh. Bahkan di setiap tahunnya perolehan kedua pajak tersebut bahkan tidak mencapai 50% dari pendapatan BPHTB kota Surabaya. Maka, kontribusi pajak hiburan dan pajak reklame jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kontribusi BPHTB kota Surabaya di tahun 2015-2017.

Pada awalnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tidak termasuk dalam pajak daerah karena BPHTB sebelumnya berada di tangan pemerintahan pusat. Namun, terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun 2011 dengan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), dengan demikian per tanggal 1 Januari 2011 Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) sudah tidak lagi melayani pengelolaan pelayanan BPHTB, sehingga wajib pajak yang akan melaporkan pembayaran BPHTB sehubungan dengan proses transaksi properti yang dilakukannya akan langsung ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.[48]

---

[48] Eddy Wahyudi, "Mulai 1 Januari 2011 BPHTB Telah Resmi Menjadi Pajak Daerah" https://www.kompasiana.com/eddiwahyudi/55005d3f813311091bfa76c3/mulai-1-januari-2011-bphtb-telah-resmi-menjadi-pajak-daerah# (Pada 18 Mei 2019 pukul 16.10)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disamping itu menurut teori pajak properti internasional yang selama ini dipakai oleh para penggagas UU ini adalah bahwa *property tax* cenderung lebih bersifat lokal. Fisibilitas dan immobilitasnya menjadi salah satu alasan penting mengapa BPHTB lebih cenderung menjadi pajak daerah.[49]

Dalam proses pemungutan BPHTB sebagai pajak daerah, banyak sekali pihak-pihak yang terlibat seperti Kantor Pertanahan, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Bank, Pemerintahan Daerah, Pengadilan termasuk lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) merupakan pajak yang dikenakan sebagai akibat dari hak atas tanah dan bangunan yang secara formal dapat diartikan sebagai peristiwa hukum yang menyebabkan berhaknya seseorang atau badan dalam kepemilikan atas tanah dan bangunan. Transaksi paling besar yang menghasilkan pemasukan dari BPHTB adalah transaksi peralihan hak atas dan bangunan terutama transaksi jual beli hak atas tanah dan bangunan.[50] Maka tidak heran apabila pada tahun 2015-2017 BPHTB terus-menerus menjadi pemasukan tertinggi yang berkontribusi dalam pajak daerah kota Surabaya.

Surabaya sendiri merupakan salah satu kota besar yang juga berkedudukan sebagai Ibu kota provinsi Jawa Timur sehingga

[49] Idem
[50] Widayat Adimas Wahyu, "Analisis Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dalam Proses Jual Beli Tanah di Kabupaten Kebumen", Lex Renaissance No. 2 VOL. 1 JULI, 2016, Hlm 175

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkembangan jual beli tanah dan bangunan atau yang bisa disebut dengan pajak properti terus berkembang setiap tahunnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya dari sektor pajak pada tahun 2018 mencapai Rp 3,7 triliun. Nominal yang terealisasi tersebut melampaui target awal, yaitu Rp 3,6 triliun yang direncanakan dalam APBD. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Pemkot Surabaya Yusron Sumartono mengatakan, pendapatan pajak daerah yang tertinggi masih ditopang dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mencapai Rp 1,1 triliun. Pendapatan terbesar kedua dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp 1,1 triliun.[51]

Selain itu, pajak tertinggi juga didapatkan dari sektor pajak restoran yang mendapatkan pemasukan sebesar Rp 466 miliar. Menurut Yusron pertumbuhan restoran di Surabaya cukup signifikan, hampir setiap ruko dan hotel yang tumbuh menyertakan tumbuhnya kafe dan restoran. Sedangkan, untuk pajak hiburan dan pajak reklame sendiri pendapatannya jauh dibanding dengan ketiga sektor tersebut diatas. Untuk pajak hiburan mendapatkan

[51]Wijayanto,"PAD Surabaya Lampaui Target, BPHTB jadi Kontributor Tertinggi"(https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2018/12/28/110707/pad-surabaya-lampaui-target-bphtb-kontributor-tertinggi) Pada 19 Mei 2019, pkl 13.57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemasukan sebesar Rp 78 miliar dan pajak reklame dengan jumlah Rp 137 miliar.[52]

Dari penjelasan diatas maka kita dapat menyimpulkan bahwa BPHTB selalu menjadi pemasukan terbesar selama bertahun-tahun dalam pendapatan asli daerah kota Surabaya. Mengingat kebutuhan dasar manusia adalah sandang, pangan, dan papan maka tidak heran apabila setiap manusia pasti membutuhkan tanah atau bangunan yang akan dijadikan sebagai hunian untuk tempat berteduh sehari-hari karena menjadi kebutuhan primer yang harus terpenuhi. Maka dari itu, jual beli tanah dan bangunan terus-menerus mengalami perkembangan dan kemajuan seiring dengan bertambahnya jumlah populasi yang ada di kota Surabaya.

Selain itu, sebagai kota besar kota Surabaya juga mengalami perkembangan sebagai kota bisnis karena semakin banyaknya tempat usaha dengan berbagai macam bidang yang dibuka di kota pahlawan ini. Mendirikan tempat usaha tentunya memerlukan tanah atau bangunan sebagai modal utama dan pemilik usaha tersebut juga harus membayar pajak BPHTB sebagai bentuk kewajibannya. Pembukaan cabang baru yang membutuhkan tanah dan bangunan baru juga diwajibkan untuk memenuhi kewajiban dalam pembayaran pajak BPHTB. Pajak BPHTB yang dikenakan kepada

[52] Idem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

si penanggung juga jumlahnya tidak sedikit karena harga pembelian tanah atau bangunan di Surabaya ini juga terus mengalami kenaikan semakin taun. Hal-hal tersebut diataslah yang menjadi beberapa alasan mengapa BPHTB masih menjadi kontriutor utama dalam perolehan pendapatan asli daerah kota Surabaya.

Perolehan pajak BPHTB yang tinggi tidak sebanding dengan perolehan dari sektor pajak hiburan dan pajak reklame kota Surabaya selama tahun 2015 sampai 2017. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa perolehan pajak reklame setiap tahunnya hanya berkisar antara Rp 115-130 miliar. Tahun 2018 pajak ini hanya mengalami peningkatan sebesar Rp 7 miliar rupiah sehingga menjadi Rp 137 miliar.[53]

Reklame yang dipasang di kanan kiri jalanan kota Surabaya bisa dibilang jumlahnya cukup banyak. Namun, pada kenyataannya kontribusi pajak reklame ini terhadap perolehan pendapatan asli daerah kota Surabaya sangatlah minim. Jika dihitung dalam prosentase berdasarkan data yang diambil dari Badan Keuangan dan Pajak Daerah kota Surabaya, maka jumlah kontribusi pajak reklame ini terhadap PAD hanya berkisar antara 0,03%-0,04% dari

[53] Idem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

total keseluruhan perolehan PAD kota Surabaya di tahun 2015-2017.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Badan Keuangan, hal-hal yang menjadi penyebab mengapa pajak reklame tidak menjadi salah satu kontributor tertinggi dalam PAD yakni adanya perkembangan teknologi yang menjadi alasan terkuat mengapa pajak reklame kini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD kota Surabaya. Pesatnya teknologi mengakibatkan para pelaku ekonomi melakukan berbagai pemasaran produknya melalui sosial media daripada memasang reklame. Periklanan melalui sosial media seperti youtube, instagram, facebook, dan twitter tidak memerlukan persyaratan dan proses yang sulit jika dibandingkan dengan pemasangan reklame.[54]

Jika kita sebagai pelaku usaha yang sering melakukan berbagai bentuk promosi pasti kita akan memanfaatkan sosial media dengan sebaik-baiknya sebagai sarana promosi karena sangat menghemat biaya yang dibutuhkan. Sebagai pebisnis, kita dituntut untuk mengeluarkan modal sekecil-kecilnya tetapi bisa untuk menghasilkan output yang sebanyak-banyaknya. Promosi merupakan salah satu bentuk input usaha yang wajib dilakukan agar usaha kita terus berkembang dan semakin dikenal masyarakat

[54] Wawancara dengan Budi, 27 Maret 2019 di Kantor Badan Keuangan dan Pengelolaan Pajak Kota Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luas. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, membuat para pebisnis lebih giat untuk mempromosikan usahanya melalui sosial media daripada harus memasang reklame yang dipasang di jalan.

Selain proses yang terkesan panjang dan rumit, pemasangan reklame juga membutuhkan biaya yang besar. Sewanya pun bisa menghabiskan biaya hingga milyaran rupiah untuk reklame besar yang membutuhkan konstruksi khusus. Untuk pemasangan reklame pun juga ada yang membutuhkan prosedur dan persyaratan khusus terutama untuk reklame yang memiliki faktor resiko seperti pemasangan reklame rokok.

Kita tentu menghindari urusan-urusan yang menyulitkan dan yang membutuhkan dana besar. Oleh karena itu, di tahun 2015-2017 ini pajak reklame tidak mengalami kenaikan yang signifikan sehingga kontribusinya terhadap PAD kota Surabaya juga bisa dibilang sangat minim.

Karena jumlah beban pajak reklame yang jumlahnya tidak sedikit dan semakin lama mengalami kenaikan, hal ini justru menimbulkan adanya masalah baru yakni munculnya reklame ‘bodong’ atau reklame yang tidak dibayar pajaknya di masyarakat. Pihak Satpol PP kota Surabaya yang bertugas sebagai penegak Peraturan daerah (Perda), seringkali tidak melakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembongkaran akibat dari panjangnya aturan dan rantai birokrasi pelaksanaan eksekusi.[55]

Bentuk dari kenaikan pajak reklame Surabaya melalui Perwali 70/71 Tahun 2010 adalah ditujukan untuk ukuran 8 meter ke atas dengan kisaran kenaikan antara 100% hingga 400%. Sedangkan untuk reklame ukuran 8 meter ke bawah dilakukan penurunan sekitar 40%. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah kota Surabaya dalam hal menaikkan tarif pajak reklame adalah untuk membatasi pemasangan reklame raksasa yang rawan dan membahayakan masyarakat. Karena berdasarkan pemberitaan serta data yang diterima pihak pemerintah daerah kota Surabaya terdapat beberapa reklame besar yang roboh dan menimpa mobil, motor, bahkan ada yang sampai merenggut nyawa warga Surabaya, selain itu hal ini dilakukan juga untuk menghapus julukan kota Surabaya sebagai hutan reklame.

Sedangkan untuk reklame ukuran dibawah 8 meter dilakukan kebijakan dengan menurunkan pajak reklame yang bertujuan utuk memberi kesempatan bagi para Pengusaha UKM untuk mempromosikan produknya melalui media promosi reklame.[56]

Selain pajak reklame, pajak hiburan juga berkontribusi sangat kecil terhadap pendapatan asli daerah Surabaya bahkan nominalnya

[55] Reny Rinawati Op.cit Hlm 13
[56] Budi Sugiharto,"Reklame Bodong, Bagaimana Penertibannya di Surabaya?"(https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3719938/fenomena-reklame-bodong-di-surabaya-bagaimana-penertibannya), Pada 20 Mei 2019 pkl 15.01

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih kecil dibandingkan angka yang diperoleh dari sektor pajak reklame. Jika dilihat dari data yang diperoleh dari Badan Keuangan dan Pajak Daerah kota Surabaya dalam bentuk prosentase, kontribusi pajak hiburan selama tahun 2015 sampai 2017 hanya sekitar 0,019% dari total seluruh perolehan PAD Surabaya diketiga tahun tersebut.

Asosiasi Rumah Hiburan (Arumha) menilai penetapan pajak hiburan di Surabaya yang juga dikenal sebagai Kota Pahlawan tersebut, saat ini tidak realistis menyusul turunnya daya beli masyarakat. Selama ini tingginya target pajak membuat banyak pengusaha melakukan jalan pintas, agar usaha mereka tetap bertahan. Menurunnya daya beli masyarakat menjadi salah satu alasan mengapa pendapatan dari sektor pajak hiburan ini menurun. Pengusaha hiburan malam yang dikenakan pajak cukup tinggi selama ini memilih bertahan karena usaha bisa berjalan pada hari tertentu. Ditambah lagi, kebijakan pemerintah kota menutup tempat hiburan selama satu bulan, saat libur Ramadhan. Hal ini tentu cukup mengurangi pendapatan dan daya beli masyarakat terhadap hiburan malam tersebut. Para pengusaha hiburan malam akhirnya merasa bahwa usahanya dibatasi oleh pemerintah.[57]

[57] Adhitya Himawan,"Arumha Keluhkan Kenaikan Tarif PajakHiburan di Surabaya"(https://www.suara.com/bisnis/2017/09/09/055844/arumha-keluhkan-pajak-hiburan-di-surabaya-terlalu-mahal), Pada 20 Mei 2019 pkl 15.42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu penyebab rendahnya kontribusi pajak hiburan terhadap PAD Surabaya yakni dari adanya revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di Surabaya yang mulai bergulir. Namun, dalam revisi tersebut, pemkot cenderung menurunkan target pendapatan pajak daerah. Khususnya pajak untuk tempat hiburan malam. Pemkot menurunkan beban pajak dengan sangat drastis. Sebut saja diskotek, tempat karaoke dewasa, kelab malam, dan sejenisnya. Pajak untuk tempat-tempat dugem itu diturunkan dari 50 persen menjadi 20 persen. Sektor lain yang diturunkan adalah pameran busana, panti pijat, pacuan kuda, dan kontes kecantikan.

Hal tersebut sebenarnya dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pelaku usaha selama ini karena usaha di sektor hiburan memang beresiko dan juga sulit. Namun hal ini berimbas pada perolehan pajak hiburan yang semakin kecil dan tidak berpengaruh signifikan terhadap perolehan PAD Ibu kota Jawa Timur. pajak merupakan persoalan ekonomi. Dampak hiburan adalah persoalan berbeda. Jika ingin mencegah efek negatif dari pajak hiburan, pengawasan harus dilakukan bukannya justru menurunkan pengenaan pajak.

Menurut perhitungan BPPK, perolehan pajak daerah tidak terlalu signifikan. Dari total Rp 3 triliun pendapatan asli daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(PAD), sektor pajak hiburan hanya menyumbang sedikit. Paling banyak Rp 60 miliar. Hiburan malam paling mentok memberikan kontribusi Rp 5 miliar per tahun. Tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PAD Surabaya. Bahkan jika semua tempat hiburan malam ditutup, juga tidak akan mempengaruhi perolehan PAD kota Surabaya sendiri. Sikap pemkot yang menurunkan target pendapatan dari sektor pajak ini sangat disayangkan. Padahal, tahun ini, pendapatan Surabaya berada dalam masa yang bagus. Penurunan pajak hiburan malam yang pada awalnya dikenakan pajak dari 50 persen menjadi ”hanya” 20 persen. Padahal, dalam undang-undang tentang pajak daerah, tempat hiburan malam bisa dikenai pajak hingga 70 persen. Seharusnya potensi pendapatan ditingkatkan, bukan malah diturunkan. Selain potensi kerugian, penurunan tersebut menimbulkan dampak lain. Yakni, semakin terbukanya akses masyarakat terhadap hiburan malam. Jumlah hiburan malam pun bakal semakin banyak nantinya.[58]

Peningkatan kesadaran masyarakat dibidang perpajakan harus ditunjang dengan peningkatan peran aktif masyarakat untuk memenuhi kewajiban kenegaraannya dibidang perpajakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Termasuk dalam kewajiban pembayaran pajak hotel, pajak hiburan dan pajak

[58] Admin,”Surabaya Kenakan Pajak Tempat Dugem Lebih Rendah”(https://www.eramuslim.com/berita/nasional/indonesiahebat-di-surabaya-pajak-tempat-dugem-dikenakan-lebih-rendah.htm#.XOJtWKIxXIV), Pada 20 Mei 2019 pkl 16.05

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

reklame, yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Oleh karena itu sangatlah penting bagi pemerintah daerah untuk melihat atau memperhatikan permasalahan dalam pemungutan pajak daerah, salah satu contoh yaitu masih adanya penyimpangan pelaporan pendapatan yang diterima oleh pihak hiburan dan reklame kepada Dinas Pendapatan.

Masih banyak pengelola tempat-tempat hiburan yang belum membayar pajak dan menyelenggarakannya tanpa izin. Dalam pajak reklame masih banyak yang memasang spanduk tanpa izin dan apabila dalam masa izin telah habis, spanduk masih tetap terpasang. Semua permasalahan tersebut dikarenakan kurangnya kewajiban membayar pajak sehingga pendapatan daerah melalui pajak daerah kurang begitu optimal.

Suatu pajak, antara pajak satu dengan pajak yang lain tidak berdiri sendiri atau bebas, seperti contoh suatu tempat Hiburan atau Reklame bukan saja dapat diambil satu pajak tetapi bisa lebih dari satu pajak. Yang semua itu dimaksudkan untuk meningkatkan PAD untuk menyelenggarakan pemerintahan. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi pemerintah daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi serta sumber daya daerahnya guna mencapai PAD yang besar melalui pajak daerah yang pelaksanaan pemungutannya dilakukan secara terpisah, untuk melaksanakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembangunan daerah dan pembiayaan pemerintahan daerah secara optimal.[59]

[59] Electra Hazard,"Pajak Reklame dan Pajak Hiburan"(https://www.academia.edu/15160492/Pajak_Reklame_dan_Pajak_Hiburan), Pada 20 Mei 2019 pkl 16.11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Variabel Pajak Hiburan terhadap Variabel Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2015-2017.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, variabel X yang diujikan yakni pajak hiburan terhadap variabel Y yaitu variabel pendapatan asli daerah telah berkontribusi namun tidak secara signifikan terhadap PAD kota Surabaya. Hal ini dikarenakan beberapa alasan yang tentunya sudah dijabarkan dalam penjelasan diatas.

Menurut data yang bersumber dari Badan Keuangan dan Pajak Daerah, selama 3 tahun tersebut yakni tahun 2015-2017 perolehan dari sektor pajak hiburan kota Surabaya secara prosentase hanya berkontribusi sekitar 0,019% dari total seluruh perolehan PAD Surabaya. Setiap tahunnya pendapatan dari pajak ini tidak mengalami peningkatan yang berarti. Bahkan dibandingkan dengan kontributor tertinggi PAD Surabaya yakni BPHTB jumlah angka yang dicapai pajak hiburan sangatlah terpaut jauh. Kendati demikian, perolehan pajak hiburan dari kota pahlawan ini tetap ikut berkontribusi dalam pendapatan asli daerah yang meningkat setiap tahunnya walaupun pengaruhnya sangat kecil dan tidak terlalu berarti.

Asosiasi Rumah Hiburan (Arumha) menilai penetapan pajak hiburan di Surabaya yang juga dikenal sebagai Kota Pahlawan tersebut, saat ini tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

realistis menyusul turunnya daya beli masyarakat. Selama ini tingginya target pajak membuat banyak pengusaha melakukan jalan pintas, agar usaha mereka tetap bertahan. Menurunnya daya beli masyarakat menjadi salah satu alasan mengapa pendapatan dari sektor pajak hiburan ini menurun. Pengusaha hiburan malam yang dikenakan pajak cukup tinggi selama ini memilih bertahan karena usaha bisa berjalan pada hari tertentu.[60] Namun, disisi lain revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah di Surabaya yang cenderung menurunkan target pendapatan pajak daerah khususnya pajak untuk tempat hiburan malam mengakibatkan turunnya beban pajak dengan sangat drastis. Sebut saja diskotek, tempat karaoke dewasa, kelab malam, dan sejenisnya. Pajak untuk tempat-tempat dugem itu diturunkan dari 50 persen menjadi 20 persen. Hal ini menyebabkan kontribusi pajak hiburan yang semula nominalnya kecil menjadi semakin menurun jumlahnya.[61]

Suwarno dan Suhartiningsih (2008) dalam penelitiannya yang berjudul "Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten Sukoharjo)" menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pajak daerah berpotensi untuk terus digali guna meningkatkan penerimaan daerah. [62]

Teori tersebut sejalan dengan pajak hiburan kota Surabaya yang sebenarnya memiliki potensi untuk terus ditingkatkan dan dikembangkan,

[60] Himawan Aditya loc.cit
[61] Admin,"Surabaya Kenakan Pajak Tempat Dugem Lebih Rendah" loc.cit
[62] Suwarno dan Suhartiningsih, "Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan AsliDaerah (Studi pada Kabupaten Sukoharjo)", (http://etheses.uin-malang.ac.id/1975/6/09510081_Bab_2.pdf), Pada 4 april 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asalkan pemerintah bisa lebih giat lagi dalam menggali dan mengembangkan potensi serta sumber daya daerahnya guna mencapai PAD yang besar melalui pajak daerah yang pelaksanaan pemungutannya dilakukan secara terpisah, untuk melaksanakan pembangunan daerah dan pembiayaan pemerintahan daerah secara optimal. Karena, antara pajak satu dengan pajak yang lain tidak berdiri sendiri atau bebas, seperti contoh suatu tempat Hiburan atau Reklame bukan saja dapat diambil satu pajak tetapi bisa lebih dari satu pajak. Yang semua itu dimaksudkan untuk meningkatkan PAD untuk menyelenggarakan pemerintahan.[63]

B. Pengaruh Pajak Reklame terhadap Variabel Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya Tahun 2015-2017.

Berbeda dengan pembahasan sebelumnya yakni pengaruh variabel X yakni mengenai pajak hiburan, maka pembahasan kali ini akan melihat pengaruh variabel X yang diwakii oleh pajak reklame terhadap variabel Y nya yaitu pendapatan asli daerah kota Surabaya.

Menurut data yang bersumber dari Badan Keuangan dan Pajak Daerah, selama 3 tahun yakni tahun 2015-2017 tersebut perolehan dari sektor pajak reklame kota Surabaya secara prosentase hanya berkontribusi sekitar 0,03-0,04% dari total seluruh perolehan PAD Surabaya. Setiap tahunnya pendapatan dari pajak ini tidak mengalami peningkatan yang berarti. Bahkan dibandingkan dengan kontributor tertinggi PAD Surabaya

[63] Electra Hazard loc.cit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni BPHTB jumlah angka yang dicapai pajak reklame sangatlah terpaut jauh. Kendati demikian, perolehan pajak reklame dari kota pahlawan ini tetap ikut berkontribusi dalam pendapatan asli daerah yang meningkat setiap tahunnya walaupun pengaruhnya sangat kecil dan tidak terlalu berarti.

Pengaruh yang sangat minim dari pajak reklame terhadap PAD kota Surabaya dikarenakan beberapa hal. Seperti yang dikemukakan oleh pihak Badan Keuangan dan Pajak Daerah kota Surabaya salah satu penyebab kecilnya kontribusi pajak reklame ini adalah karena sosial media yang sedang dalam masa berkembang pesat.[64] Pesatnya teknologi mengakibatkan para pelaku ekonomi melakukan berbagai pemasaran produknya melalui sosial media daripada memasang reklame. Periklanan melalui sosial media seperti youtube, instagram, facebook, dan twitter tidak memerlukan persyaratan dan proses yang sulit jika dibandingkan dengan pemasangan reklame.

Jika kita sebagai pelaku usaha yang sering melakukan berbagai bentuk promosi pasti kita akan memanfaatkan sosial media dengan sebaik-baiknya sebagai sarana promosi karena sangat menghemat biaya yang dibutuhkan. Sebagai pebisnis, kita dituntut untuk mengeluarkan modal sekecil-kecilnya tetapi bisa untuk menghasilkan output yang sebanyak-banyaknya. Promosi merupakan salah satu bentuk input usaha yang wajib dilakukan agar usaha kita terus berkembang dan semakin dikenal masyarakat luas. Dengan

[64] Wawancara dengan Budi loc.cit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkembangnya teknologi saat ini, membuat para pebisnis lebih giat untuk mempromosikan usahanya melalui sosial media daripada harus memasang reklame yang dipasang di jalan.

Karena jumlah beban pajak reklame yang jumlahnya tidak sedikit dan semakin lama mengalami kenaikan, hal ini justru menimbulkan adanya masalah baru yakni munculnya reklame 'bodong' atau reklame yang tidak dibayar pajaknya di masyarakat.[65]

Alasan-alasan diatas merupakan beberapa hal yang mengakibatkan perolehan PAD dari sektor pajak reklame semakin menurun dan tidak mengalami perkembangan yang signifikan setiap tahunnya. Namun, pajak reklame ini selalu berkontribusi setiap tahunnya dalam pendapatan asi daerah Surabaya dan dari pajak tersebut dapat digunakan untuk membiayai keperluan daerah yang terkait dengan kebutuhan masyrakat luas.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo mengemukakan pajak merupakan iuran dari rakyat yang akan masuk dalam kas negara yang bersifat memaksa dengan imbalan secara tidak langsung dan diperuntukkan untuk keperluan secara umum.[66] Dalam hal ini pajak yang nantinya akan digunakan untuk keperluan umum adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka dapat disimpulkan bahwa pajak yang didalamnya juga berasal dari pajak reklame ini yang juga merupakan komponen PAD.

Sejalan dengan adanya teori tersebut maka penelitian ini juga menyatakan bahwa terdapat pengaruh dari pajak reklame terhadap

[65] Reny Rinawati loc.cit
[66] Putra ET, "Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis",(http://repository.unpas.ac.id/13657/5/Bab%20II.pdf), Pada 3 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapatan asli daerah. Pajak reklame di kota Surabaya terbukti memiliki pengaruh terhadap PAD kota Surabaya dan berpengaruh walaupun jumlah kontribusinya sangatlah minim, seperti yang kita ketahui bahwa Surabaya merupakan ibukota Jawa Timur.

Sampai dengan hari ini pun kita dapat melihat jumlah reklame yang dipasang dikanan kiri jalanan kota Surabaya. Hal ini membuktikan bahwa reklame masih diminati oleh sebagian masyarakat. Walaupun pengaruhnya sedikit, tetapi pajak dari reklame ini bisa digunakan untuk pembiayaan terkait dengan kebutuhan kota Surabaya. Imbalan dari pembayaran pajak reklame ini bukan hanya dapat dirasakan oleh pihak yang memasang reklame saja, tetapi juga untuk masyarakat lain yang ada di kota Surabaya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis diatas, maka penelitian ini mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pajak hiburan (X1) memiliki pengaruh terhadap variabel dependennya yakni variabel pendapatan asli daerah (PAD) kota Surabaya dengan jumlah prosentase sebesar 0,19% dari total keseluruhan PAD kota Surabaya selama 3 tahun yakni tahun 2015-2017. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pajak hiburan berkontribusi sangat kecil dan tidak memiliki pengaruh yang cukup berarti. Jika dibandingkan dengan kontributor tertinggi PAD yakni Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berkontribusi hampir 50% dalam PAD setiap tahunnya, pajak hiburan ini berbanding jauh dengan perolehan yang didapatkan oleh BPHTB tersebut.
2. Variabel pajak reklame (X2) memiliki pengaruh terhadap variabel dependennya yakni variabel pendapatan asli daerah (PAD) kota Surabaya dengan jumlah prosentase sebesar 0,03%-0,04% dari total keseluruhan PAD kota Surabaya selama 3 tahun yakni tahun 2015-2017. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Pajak reklame berkontribusi sangat kecil dan tidak memiliki pengaruh yang cukup berarti. Jika dibandingkan dengan kontributor tertinggi PAD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berkontribusi hampir 50% dalam PAD setiap tahunnya, pajak reklame ini berbanding jauh dengan perolehan yang didapatkan oleh BPHTB tersebut.

B. SARAN

1. Masukan bagi pemerintah yakni untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak hiburan di kota Surabaya. Hal ini dikarenakan banyaknya fasilitas-fasilitas hiburan yang ada di Surabaya sehingga mengakibatkan banyak warga dari dalam dan luar daerah untuk datang untuk sekedar mengunjungi atau bahkan menikmati berbagai fasilitas tersebut. Maka, kedepannya hal ini bisa menjadi aset untuk pemerintahan daerah yang dapat mengembangkan kota Surabaya sebagai Ibu kota Jawa Timur.

   Kemudian untuk pajak hiburan dari sektor hiburan malam, sebaiknya pajaknya tetap dikenakan dengan prosentase semula yakni 50% karena penurunan pajak hiburan justru akan semakin menurunkan kontribusi pajak tersebut terhadap PAD.
2. Melihat dari hasil penelitian diatas, pajak reklame berkontribusi sangat kecil terhadap PAD Surabaya. Hal tersebut dikarenakan berbagai faktor yang dijelaskan diatas salah satunya dikarenakan adanya kemajuan teknologi, maka dari itu pemerintah harus lebih memfokuskan lagi pengenaan pajak di sektor IT, sehingga masyarakat yang melakukan pemasaran atau kegiatan ekonomi lain melalui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

internet tetap bisa dikenakan pajak yang sesuai sehingga hal tersebut tidak akan mengurangi perolehan PAD kota Surabaya dari sektor pajak tetapi justru dapat berlaku sebaliknya yakni meningkatkan perolehan pendapatan asli daerah.

Selain itu, rumitnya proses pengajuan pemasangan reklame dan juga harga sewanya yang cukup mahal juga menjadi salah satu penyebabnya. Maka, diharapkan pemerintah dapat meminimalisir prosedur-prosedur pemasangan reklame namun tetap sesuai dengan aturan yang berlaku, dan juga menurunkan biaya sewa reklame namun tetap dalam taraf harga yang rasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah dan Halim. 2003. "Pengaruh Pajak Daerah dan PAD terhadap Belanja Daerah di Indonesia".Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol 7, No. 1.

Adisasmita Rahardjo, "Pembiayaan Pembangunan Daerah"(Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011) Hlm 8

Admin, "Pengertian dan Jenis Metode Deskriptif", (www.Idtesis.com), Pada 8 November 2018

Admin,"Surabaya Kenakan Pajak Tempat Dugem Lebih Rendah"(https://www.eramuslim.com/berita/nasional/indonesiahebat-di-surabaya-pajak-tempat-dugem-dikenakan-lebih-rendah.htm#.XOJtWKIxXIV), Pada 20 Mei 2019 pkl 16.05

Alfan A Lamia Dkk "Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara", Universitas Sam Ratulangi, (Manado: Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 2015) Hlm 789

Bayu Tjahyono Muhammad, "Reformasi Pajak Rakyat Dapat Apa", (www.pajak.go.id), Pada 2 September 2018

BPS Jawa Timur "Jumlah Individu Jawa Timur Tahun 2017" (www.jatim.bps.go.id), Pada 5 September 2018

BPS Surabaya, "Jumlah Individu Kota Surabaya Tahun 2017", (www.Surabayakota.bps.go.id), Pada 5 Septemeber 2018

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif , (Jakarta: Kencana, 2017) Hlm 25Admin, "Tentang Kota Surabaya", (www.eastjava.com) , Pada 3 Maret 2019

Cermati, "Pajak Reklame, Apa Itu? Bagaimana Perhitungannya?", (www.cermati.com), Pada 11 Februari 2019

Chandra Ervina Yulia, "Pengaruh pemungutan pajak Hotel dan Pajak restoran dan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dinas pendapatan Asli daerah Bekasi", (www.slideshare.net), Pada 5 November 2018

Chlief Watuseke dkk"AnalisisPotensi Pajak Hiburan di Kota Manado", Jurnal Universitas Sam Ratulangi Manado (Manado: Jurnal Emba) Hlm 528

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ery H Afrilyanita, "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Probolinggo pada Era Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004"Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang, Vol 1 No 1 2009, Hal 8

Hamongan Simanjuntak Timbul dan Mukhlis Imam, " Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi"(Jakarta: Raih Asa Sukses. 2012) Hlm 13

HazardElectra,"Pajak Reklame dan Pajak Hiburan"(https://www.academia.edu/15160492/Pajak_Reklame_dan_Pajak_Hiburan), Pada 20 Mei 2019 pkl 16.11

Hestanto, "Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Para Cendekiawan), (www.hestanto.web.id), Pada 28 September 2018

Himawan Adhitya,"Arumha Keluhkan Kenaikan Tarif PajakHiburan di Surabaya"(https://www.suara.com/bisnis/2017/09/09/055844/arumha-keluhkan-pajak-hiburan-di-surabaya-terlalu-mahal), Pada 20 Mei 2019 pkl 15.42

Indreswari Adisti Dini"Kiprah Raja Mal di Kota Pahlawan", (www.Industri.kontan.co.id), Pada 7 September 2018

Itsmis, "Kenali Karakteristik Kota Surabaya Minimalkan Dampak Gempa", (www.its.ac.id), Pada 5 Maret 2019

Lubis Irwansyah dan Lubis Abidah Sari, Lubis Muhammad Zuhdi, "Taat Hukum Pajak"(Jakarta: Wacana Media. 2018) Hlm 35

Mardiasmo,"Perpajakan Edisi Terbaru Tahun 2016"(Yogyakarta:CV Andi Offset. 2016) Hlm 15

Priantara Diaz, "Perpajakan Indonesia Edisi 2"(Jakarta: Mitra Wacana Media: 2012) Hlm 558

PutraET, "Bab II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis",(http://repository.unpas.ac.id/13657/5/Bab%20II.pdf), Pada 3 April 2019

Ramadhan Bayu, "Wow Indonesia 5 Besar Dunia Penyumbang Kelahiran Bayi Tahun 2018", (www.goodnewsfromindonesia.id), Pada 5 September 2018

Reny Rinawati, "Analisis Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya", (http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id), Pada 20 Oktober 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Reza Arditia "ANALISIS KONTRIBUSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAHKOTA SURABAYA", (http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id), Pada 20 Oktober 2018

Soeradi, "Pengelolaan Keuangan Negara di Era Otonomi Daerah"(Yogyakarta:Graha Ilmu. 2014) Hlm 18

Sugiharto Budi,"Reklame Bodong, Bagaimana Penertibannya di Surabaya?"(https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3719938/fenomena-reklame-bodong-di-surabaya-bagaimana-penertibannya), Pada 20 Mei 2019 pkl 15.01

Sunar Prasetyono Dwi, "Buku Pintar Pajak"(Jogjakarta: Laksana. 2012) Hlm 12

Supriadi Rizki Dara, "Kontribusi Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Malang", Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya, (Malang: Jejak VOL 1, 2015) Hlm 4

Susyanti Jeni dan Dahlan Ahmad, "Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi" (Malang: Empatdua Media. 2016), Hlm 266

Suwarno dan Suhartiningsih, "Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten Sukoharjo)", (http://etheses.uin-malang.ac.id/1975/6/09510081_Bab_2.pdf), Pada 4 april 2019

Syaeful Bahri dan Madzalim, "Pemetaan Topografi, Geofisika, dan Geologi Kota Surabaya", University Of Surabaya (UNESA), (Surabaya: Jurnal Penelitian Fisika dan Aplikasinya, 2012), Hlm 25

Tjutju Soendari, "Jurnal Metode Penelitian Desktiptif", (http://file.upi.edu), Pada 8 November 2018

Wahyudi Eddy, "Mulai 1 Januari 2011 BPHTB Telah Resmi Menjadi Pajak Daerah" https://www.kompasiana.com/eddiwahyudi/55005d3f813311091bfa76c3/mulai-1-januari-2011-bphtb-telah-resmi-menjadi-pajak-daerah# (Pada 18 Mei 2019 pukul 16.10)

Waluyo, "Perpajakan Indonesia Edisi 10 "(Jakarta: Salemba Empat, 2011) hal.225

Wardhono, et al. "Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pembangunan Kota Surabaya" (https://repository.stiesia.ac.id), Pada 15 September 2018)

Wawancara dengan Budi, 27 Maret 2019 di Kantor Badan Keuangan dan Pengelolaan Pajak Kota Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Widayat Adimas Wahyu, “Analisis Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Dalam Proses Jual Beli Tanah di Kabupaten Kebumen”, Lex Renaissance No. 2 VOL. 1 JULI, 2016, Hlm 175

Wijayanto,”PAD Surabaya Lampaui Target, BPHTB jadi Kontributor Tertinggi”(https://radarsurabaya.jawapos.com/read/2018/12/28/110707/pad-surabaya-lampaui-target-bphtb-kontributor-tertinggi) Pada 19 Mei 2019, pkl 13.57

Woro Damayanti Theresia dan Supramono, “Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan”(Yogyakarta: Andi. 2005) Hlm 2

Yani Ahmad, “Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia”(Jakarta: PT Raja Grafindo persada. 2002) Hlm. 51

Zain Mohammad, “Manajemen Perpajakan”(Jakarta: Salemba Empat: 2003) Hlm 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id